



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2025. LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Mamuju, Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Mamuju



DR. HJ. KIJATMAH AHMAD, S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19720703 199803 2 011

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.2 Visi dan Misi

1.3 Data Umum Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Perjanjian Kinerja

BAB III ANKUNTABILITAS KINERJA

III.I Capaian Kinerja OPD

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target 2025

4. Perbandingan Realisasi Kinerja daerah dengan Nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

III.II Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam salah satu pasal dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa azas azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Untuk memberikan dasar pijakan yang jelas, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 ini mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bupati Mamuju

Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 9).

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 22 Tahun 2016 sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pendidikan pemuda dan olahraga, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pendidikan pemuda dan olahraga.
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, kesetaraan pendidikan dasar, kepemudaan, keolahragaan serta kepramukaan di kabupaten;
5. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, kesetaraan pendidikan dasar, kepemudaan, keolahragaan serta kepramukaan di kabupaten;
6. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, serta kesetaraan pendidikan dasar di kabupaten;

7. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat dalam daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 2. Seksi Pembinaan Ketenagaan;
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 2. Seksi Pembinaan Ketenagaan;
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik;
 2. Seksi Pembinaan Ketenagaan;
 3. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;
- f. Bidang Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga;
 3. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
- g. Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal

D. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang diihadapi antara lain :

1. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Di beberapa wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antar kelompok usia, wilayah geografis, dan status sosial ekonomi. Rendahnya APS menjadi tantangan struktural dalam akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan adapun faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Faktor Sosial Ekonomi Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak harus bekerja atau membantu orang tua, sehingga tidak melanjutkan sekolah
- b. Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan Fasilitas pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menghambat akses fisik ke sekolah
- c. Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pendidikan masih terdapat budaya atau persepsi yang memandang Pendidikan formal sebagai kurang relevan, terutama untuk anak perempuan atau kelompok rentan

2. Belum optimalnya Distribusi dan Kualitas guru

Distribusi dan kualitas guru di berbagai wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ketidakeimbangan ini berdampak langsung pada pencapaian mutu pendidikan, pemerataan layanan belajar, dan efektivitas implementasi kurikulum. Di banyak daerah, guru yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi, latar belakang pendidikan, atau pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam konteks pendidikan inklusif dan kebencanaan adapun faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Ketimpangan alokasi guru antar wilayah seperti Penempatan guru masih cenderung menumpuk di wilayah perkotaan dan pusat-pusat layanan pendidikan, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik yang memadai.
 - b. Kualitas Pendidikan dan pelatihan guru yang belum merata seperti Program peningkatan kompetensi guru belum menjangkau semua wilayah secara adil, terutama dalam hal pelatihan berbasis kebutuhan lokal seperti Pendidikan kebencanaan, inklusif, dan digital
- ## 3. Bahasa daerah mengalami penurunan fungsi dan eksistensi dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan ruang publik, sehingga terancam punah dan kehilangan peran strategisnya sebagai identitas budaya, alat komunikasi lokal, dan sumber nilai kearifan lokal

Penggunaan bahasa daerah semakin terbatas di kalangan generasi muda, lembaga pendidikan, dan media komunikasi, yang menyebabkan melemahnya transmisi antar generasi dan berkurangnya dokumentasi bahasa daerah secara sistematis. Ketidakhadiran bahasa daerah dalam kebijakan pendidikan formal adapun faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi bahasa daerah seperti Banyak bahasa daerah belum memiliki kamus, modul pembelajaran, atau platform digital yang mendukung pelestarian dan pembelajaran
 - b. Terbatasnya kapasitas guru dan fasilitator lokal seperti Tenaga pendidik belum dibekali pelatihan atau sumber daya yang memadai untuk mengajarkan bahasa daerah secara kontekstual dan menarik
 - c. Stigma sosial terhadap penggunaan bahasa daerah: Di beberapa komunitas, penggunaan bahasa daerah dianggap kurang modern atau tidak relevan, sehingga generasi muda enggan menggunakannya
4. Belum optimalnya Kapasitas dan keterampilan pemuda
- Sebagian besar pemuda belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, dan ruang partisipasi sosial yang inklusif. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan lokal menyebabkan potensi pemuda belum termanfaatkan secara maksimal dalam mendorong inovasi, ketahanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi daerah adapun faktor yang mempengaruhi antara lain :
- a. Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan kewirausahaan seperti Program peningkatan keterampilan belum menjangkau seluruh lapisan pemuda, terutama di daerah terpencil dan marginal
 - b. Minimnya ruang partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan: Forum-forum kebijakan dan program daerah belum secara sistematis melibatkan pemuda sebagai aktor perubahan.
 - c. Stigma dan hambatan sosial terhadap pemuda marginal seperti Pemuda dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan daerah 3T sering menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap program pengembangan diri.
5. Prestasi olahraga daerah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan, disebabkan oleh keterbatasan sistem pembinaan, minimnya dukungan lintas sektor, serta belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga yang layak dan merata
- Pengembangan prestasi olahraga daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, mulai dari kurangnya fasilitas latihan yang sesuai standar, terbatasnya pelatih berkualitas, hingga rendahnya partisipasi dan regenerasi atlet muda. Ketimpangan akses terhadap sarana prasarana olahraga di berbagai wilayah turut memperlemah ekosistem pembinaan dan kompetisi yang berkelanjutan, sehingga potensi atlet daerah belum tergali secara maksimal adapun faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan olahraga: Olahraga daerah belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga alokasi untuk pembinaan dan fasilitas masih minim
- b. Distribusi sarana prasarana yang tidak merata: Fasilitas olahraga cenderung terpusat di ibu kota kabupaten/kota, sementara kecamatan dan desa kekurangan akses terhadap lapangan, gedung, dan alat olahraga yang layak
- c. Kurangnya pelatih dan tenaga pendukung profesional: Pembinaan atlet belum didukung oleh pelatih bersertifikat, fisioterapis, dan psikolog olahraga yang memadai
- d. Minimnya kompetisi lokal yang berjenjang dan berkelanjutan: Ajang kompetisi di tingkat daerah belum terstruktur secara rutin dan tidak terintegrasi dengan sistem pembinaan nasional

Dengan memperhatikan hambatan/kendala di atas serta upaya meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di masa mendatang agar lebih baik, perlu dilakukan :

1. Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah, seragam, dan transportasi melalui sekolah atau pemerintah daerah.
2. Memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk meringankan biaya pendidikan siswa.
3. Melakukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan Pendampingan keluarga berisiko melalui guru, sekolah, dan pemerintah desa
4. Rehabilitasi sekolah yang rusak agar layak digunakan untuk proses belajar mengajar
5. Penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, perpustakaan, dan laboratorium
6. Membuka kelas jauh atau sekolah filial di wilayah yang sulit dijangkau.
7. Mengembangkan pembelajaran berbasis digital atau pembelajaran jarak jauh untuk daerah yang sulit dijangkau dan Penyediaan perangkat TIK dan jaringan internet secara bertahap di sekolah
8. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai manfaat pendidikan
9. Guru dan pihak sekolah melakukan pendekatan kepada orang tua melalui pertemuan komite sekolah atau kunjungan rumah
10. Melakukan pendataan dan penjangkauan anak yang tidak sekolah agar dapat kembali mengikuti pendidikan formal atau pendidikan kesetaraan
11. Melakukan penataan dan redistribusi guru secara berkala agar distribusi guru lebih merata antar wilayah dan Menempatkan guru baru berdasarkan kebutuhan sekolah, terutama di daerah terpencil dan Melakukan pemetaan kebutuhan guru

- berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga perencanaan distribusi guru lebih tepat sasaran
- Mendorong dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas penunjang bagi guru di daerah terpencil, seperti rumah dinas dan sarana transportasi
 - Menyusun modul pembelajaran bahasa daerah untuk digunakan di sekolah dan Mengintegrasikan bahasa daerah sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah
 - Menyediakan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan yang ramah bagi kelompok rentan dan Menyesuaikan fasilitas pelatihan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
 - Melibatkan pemuda secara aktif dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
 - Memastikan program kepemudaan dapat diakses oleh pemuda dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan
 - Memperkuat koordinasi dengan organisasi olahraga daerah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga.
 - Melakukan rehabilitasi dan perawatan fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap layak digunakan dan Melakukan pemetaan kebutuhan sarana olahraga di setiap wilayah sehingga pembangunan fasilitas dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran
 - Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi pelatih secara berkala agar memiliki kompetensi yang sesuai standar pembinaan olahraga dan Mendorong pelatih untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 - Pengembangkan program kaderisasi pelatih dari mantan atlet daerah agar dapat menjadi pelatih di cabang olahraga masing-masing dan Mengadakan workshop dan seminar tentang ilmu kepelatihan olahraga

Tabel identifikasi masalah dan solusi

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Solusi
1	Masih Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di beberapa wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antar kelompok usia, wilayah geografis, dan status sosial ekonomi. Rendahnya APS menjadi tantangan struktural dalam akses, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan.	Faktor Sosial Ekonomi Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak-anak harus bekerja atau membantu orang tua, sehingga tidak melanjutkan sekolah	Penyaluran bantuan perlengkapan sekolah, seragam, dan transportasi melalui sekolah atau pemerintah daerah
				Memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk meringankan biaya pendidikan siswa.
				Melakukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan Pendampingan keluarga berisiko melalui guru, sekolah, dan pemerintah desa
		Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan Fasilitas pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), menghambat akses fisik ke sekolah		Rehabilitasi sekolah yang rusak agar layak digunakan untuk proses belajar mengajar
				Penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, perpustakaan, dan laboratorium
				Membuka kelas jauh atau sekolah filial di wilayah yang sulit dijangkau.
				Mengembangkan pembelajaran berbasis digital atau pembelajaran jarak jauh untuk daerah yang sulit dijangkau dan Penyediaan perangkat TIK dan jaringan internet secara bertahap di sekolah terpencil

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Solusi
			Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pendidikan masih terdapat budaya atau persepsi yang memandang Pendidikan formal sebagai kurang relevan, terutama untuk anak perempuan atau kelompok rentan	Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai manfaat pendidikan
				Guru dan pihak sekolah melakukan pendekatan kepada orang tua melalui pertemuan komite sekolah atau kunjungan rumah
				Melakukan pendataan dan penjangkauan anak yang tidak sekolah agar dapat kembali mengikuti pendidikan formal atau pendidikan kesetaraan
				Menyediakan alternatif pendidikan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C bagi anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.
2	Belum optimalnya Distribusi dan Kualitas guru	Distribusi dan kualitas guru di berbagai wilayah masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ketidakseimbangan ini berdampak langsung pada pencapaian mutu pendidikan, pemerataan layanan belajar, dan efektivitas implementasi kurikulum. Di banyak daerah, guru yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi, latar belakang pendidikan, atau pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam konteks pendidikan inklusif dan kebencanaan	Ketimpangan alokasi guru antar wilayah seperti Penempatan guru masih cenderung menumpuk di wilayah perkotaan dan pusat-pusat layanan pendidikan, sementara daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik yang memadai.	Melakukan penataan dan redistribusi guru secara berkala agar distribusi guru lebih merata antar wilayah dan Menempatkan guru baru berdasarkan kebutuhan sekolah, terutama di daerah terpencil dan Melakukan pemetaan kebutuhan guru berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga perencanaan distribusi guru lebih tepat sasaran
			Kualitas Pendidikan dan pelatihan guru yang belum merata seperti Program peningkatan kompetensi guru belum menjangkau semua wilayah secara adil, terutama dalam hal pelatihan berbasis kebutuhan lokal seperti Pendidikan kebencanaan, inklusif, dan digital	Mengembangkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran digital untuk membantu sekolah yang kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu
				Mendorong dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas penunjang bagi guru di daerah terpencil, seperti rumah dinas dan sarana transportasi
3	Bahasa daerah mengalami penurunan fungsi dan eksistensi dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan ruang publik, sehingga terancam punah dan kehilangan peran strategisnya sebagai identitas budaya, alat komunikasi lokal, dan sumber nilai kearifan lokal	Penggunaan bahasa daerah semakin terbatas di kalangan generasi muda, lembaga pendidikan, dan media komunikasi, yang menyebabkan melemahnya transmisi antar generasi dan berkurangnya dokumentasi bahasa daerah secara sistematis. Ketidakhadiran bahasa daerah dalam kebijakan pendidikan formal	Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi bahasa daerah seperti Banyak bahasa daerah belum memiliki kamus, modul pembelajaran, atau platform digital yang mendukung pelestarian dan pembelajaran	Menyusun kamus bahasa daerah, buku tata bahasa, dan kumpulan cerita rakyat sebagai bahan referensi pembelajaran
				Menyusun modul pembelajaran bahasa daerah untuk digunakan di sekolah dan Mengintegrasikan bahasa daerah sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah
			Terbatasnya kapasitas guru dan fasilitator lokal seperti Tenaga pendidik belum dibekali pelatihan atau sumber daya yang memadai untuk mengajarkan bahasa daerah secara kontekstual dan menarik	Mengajak tokoh adat, budayawan, dan penutur asli untuk membantu proses pendokumentasian bahasa dan Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian, publikasi, dan digitalisasi bahasa daerah.
			Stigma sosial terhadap penggunaan bahasa daerah: Di beberapa komunitas, penggunaan bahasa daerah dianggap kurang modern atau tidak relevan, sehingga generasi muda enggan menggunakannya	Menyelenggarakan pelatihan khusus bagi guru dan fasilitator lokal tentang metode pengajaran bahasa daerah yang kreatif dan kontekstual dan Menyusun modul, buku ajar, dan media pembelajaran bahasa daerah yang mudah digunakan oleh guru
4	Belum optimalnya Kapasitas dan keterampilan pemuda	Sebagian besar pemuda belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, dan ruang partisipasi sosial yang inklusif. Ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan lokal menyebabkan potensi pemuda belum termanfaatkan secara maksimal dalam mendorong inovasi, ketahanan sosial, dan pertumbuhan ekonomi daerah	Terbatasnya akses pelatihan vokasional dan kewirausahaan seperti Program peningkatan keterampilan belum menjangkau seluruh lapisan pemuda, terutama di daerah terpencil dan marginal	Mengembangkan pelatihan kewirausahaan berbasis online agar dapat diakses oleh pemuda di berbagai wilayah dan Menyediakan materi pelatihan digital, video tutorial, dan modul kewirausahaan
			Minimnya ruang partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan: Forum-forum kebijakan dan program daerah belum secara sistematis melibatkan pemuda sebagai aktor perubahan.	Memberikan pendampingan usaha dan inkubasi bisnis agar usaha yang dirintis pemuda dapat berkembang dan Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk menyediakan program magang dan pelatihan kerja.
				Melibatkan pemuda secara aktif dalam forum perencanaan pembangunan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
			Stigma dan hambatan sosial terhadap pemuda marginal seperti Pemuda dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan daerah 3T sering menghadapi diskriminasi dan keterbatasan akses terhadap program pengembangan diri	Pemerintah daerah menyediakan program khusus pemberdayaan pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, olahraga, dan kewirausahaan dan Memberikan dukungan pendanaan atau fasilitasi kegiatan bagi organisasi kepemudaan
5	Prestasi olahraga daerah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan, disebabkan oleh	Pengembangan prestasi olahraga daerah masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, mulai dari kurangnya fasilitas latihan yang sesuai standar, terbatasnya pelatih berkualitas,	Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan olahraga Olahraga daerah belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga alokasi untuk pembinaan dan fasilitas masih minim	Memastikan program kepemudaan dapat diakses oleh pemuda dari berbagai latar belakang, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan
			Distribusi sarana prasarana yang tidak merata: Fasilitas olahraga cenderung terpusat	Menyediakan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan yang ramah bagi kelompok rentan dan Menyesuaikan fasilitas pelatihan agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
				Menggali sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan dunia usaha, sponsor, dan program CSR
				Memperkuat koordinasi dengan organisasi olahraga daerah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam pembinaan atlet dan pengembangan cabang olahraga.
				Menyusun prioritas pembangunan berdasarkan wilayah yang masih minim fasilitas olahraga

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Solusi
	keterbatasan sistem pembinaan, minimnya dukungan lintas sektor, serta belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga yang layak dan merata	hingga rendahnya partisipasi dan regenerasi atlet muda. Ketimpangan akses terhadap sarana prasarana olahraga di berbagai wilayah turut memperlemah ekosistem pembinaan dan kompetisi yang berkelanjutan, sehingga potensi atlet daerah belum tergali secara maksimal.	di ibu kota kabupaten/kota, sementara kecamatan dan desa kekurangan akses terhadap lapangan, gedung, dan alat olahraga yang layak	Melakukan rehabilitasi dan perawatan fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap layak digunakan dan Melakukan pemetaan kebutuhan sarana olahraga di setiap wilayah sehingga pembangunan fasilitas dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran
			Kurangnya pelatih dan tenaga pendukung profesional Pembinaan atlet belum didukung oleh pelatih bersertifikat, fisioterapis, dan psikolog olahraga yang memadai	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi pelatih secara berkala agar memiliki kompetensi yang sesuai standar pembinaan olahraga dan Mendorong pelatih untuk mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
			Minimnya kompetisi lokal yang berjenjang dan berkelanjutan: Ajang kompetisi di tingkat daerah belum terstruktur secara rutin dan tidak terintegrasi dengan sistem pembinaan nasional	Pengembangkan program kaderisasi pelatih dari mantan atlet daerah agar dapat menjadi pelatih di cabang olahraga masing-masing dan Mengadakan workshop dan seminar tentang ilmu kepelatihan olahraga

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Guna meningkatkan efisiensi dan Efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun komponen-komponen RENSTRA seperti tersebut dibawah ini :

A. Rencana Strategi (Renstra)

2. Visi dan Misi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2026 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di rumuskan bahwa Mamuju Maju dan Mandiri menjadi arah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi : **MAMUJU KEREN (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman).**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Mamuju dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju

tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2021-2025, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2025. Visi **Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedapankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

Berdasarkan uraian visi dan misi pembangunan tersebut diatas, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju mendukung program unggulan Pemerintah sebagai berikut :

Tabel II - 1
Penjabaran Program unggulan Daerah Kabupaten Mamuju kedalam Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708/2025

MISI	Program Kerja	Urusan	Nomenklatur Program Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2025
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Optimalisasi pelaksanaan Government E	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
			Program Perekonomian Dan Pembangunan
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Memberikan kenaikan tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN	KEBIJAKAN PEMDA	

MISI	Program Kerja	Urusan	Nomenklatur Program Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2025	
MISI 2 :Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Kota KEREN (Hijau, Bersih, Ramah dan bebas banjir), Pembangunan jaringan irigasi, Pembangunan & rehabilitasi drainase, Optimalisasi layanan air bersih, Pembangunan Infrastruktur Ramah Difabel, Membangun akses jalan & jembatan yang menghubungkan desa dengan pusat- pusat kegiatan,	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pembangunan jaringan infrastruktur internet Kabupaten Mamuju	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Bedah Rumah Warga Miskin	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	Pengelolaan Sampah yang Modern (pengelola, armada dan dana)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
MISI 3 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan social	Anggaran Pendidikan sebesar 20% terhadap APBD	KEBIJAKAN PEMDA		
	Memberikan kenaikan gaji guru honorer	KEBIJAKAN PEMDA		
	Pemberian Beasiswa Manakarra dari tingkat sekolah dasar hingga Sarjana	KEBIJAKAN PEMDA		
	Optimalisasi PAUD SIOLA	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Tuntas Anak Tidak Sekolah	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Tugas belajar khusus bagi bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah	KEBIJAKAN PEMDA		
	Membangun Infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi (internet) bagi semua sekolah di Kabupaten Mamuju (belajar dari pandemi covid19)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Perpustakaan KEREN, Perpustakaan terlengkap di Sulawesi Barat	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	
	Optimalisasi layanan anak sekolah melalui Mobil Sekolah KEREN	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Gerakan Literasi Desa (Menyiapkan kader pendamping literasi desa)	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	
	Pengembangan Kampung Inggris Tapalang	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Dukungan Bagi Lembaga Pendidikan Swasta SD / sederajat, SMP Sederajat dan yayasan pendidikan			

MISI	Program Kerja	Urusan	Nomenklatur Program Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2025	
	Optimalisasi pendidikan inklusi (disemua sekolah umum tersedia layanan ramah difabel)			
	Pengembangan platform belajar online			
	Optimalisasi Fungsi Stadion			
	Penyediaan Sarana Olahraga Terpadu	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Dukungan pembinaan pemuda dan olahraga			
	1 Desa 1 Ambulance (mobil layanan sosial)	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
	1 Desa 1 Bidan			
	1 Desa 1 Perawat			
	2 Dokter 1 Puskesmas			
	Peningkatan Kualitas layanan kesehatan			
	Peningkatan insentif dokter dan tenaga medis			
	Menyediakan dukungan makanan tambahan balita			
	MISI 4 : Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan kearifan lokal,budaya serta agama	Wisata Religi Keagamaan (bagi pemuka agama)	KEBIJAKAN PEMDA	
1 Desa 1 Rumah Tahfiz		KEBIJAKAN PEMDA		
Islamic Center		KEBIJAKAN PEMDA		
Pembinaan Aktivis Keagamaan		KEBIJAKAN PEMDA		
Menciptakan Kawasan Terbuka Hijau Untuk Masyarakat		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
Kenyamanan Investasi (penyederhanaan proses dan jaminan kepastian)		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penanggulangan Bencana	
		Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal		
Penguatan Kelembagaan Adat di Kab. Mamuju		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
MISI 5 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi local	Kartu Layanan Mamuju Keren	KEBIJAKAN PEMDA		
	Pengembangan Produksi dan Pemasaran Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan berbasis riset	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	Penyediaan alat-alat pertanian		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Penyediaan sarana dan parasarana produksi pertanian			

MISI	Program Kerja	Urusan	Nomenklatur Program Permendagri 90/2019 Jo Kepmendagri 050-3708/2025
	Layanan Kependudukan berbasis Desa dan Kelurahan serta sarana Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Mendorong standarisasi Unit Pengolahan Ikan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Dukungan Alat Tangkap dan Kapal		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Fasilitasi Industri Rumah Tangga misal: gula merah, ikan asap dll (membuka akses modal serta menyiapkan pasar	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengembangan UMKM
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	Pembentukan Bumdes Bersama dalam rangka pendirian Bumdes Mart Keren (jual beli, modal usaha, layanan jasa)	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pengembangan wisata terintegrasi (Pulau Karampuang, Tanjung Ngalo, Permandian Air Panas dan Permandian so'do')	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Pengembangan pusat kuliner Kota Mamuju		
	Layanan Sehari di Kecamatan/Desa	Semua urusan	Monitoring dan evaluasi

3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal*/atau *objectif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi. Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas.

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang dimiliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Strategi memberikan gambaran tentang upaya dan langkah-langkah sistematis untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam sasaran. Strategi pembangunan pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dan pengendalian pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja dinas Pendidikan
2. Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan akses seluas-luasnya kepada masyarakat,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras
5. Meningkatkan kualitas peserta didik
6. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas PTK
7. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan nonformal dan informal
8. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas PTK
9. Meningkatkan kualitas

Berdasarkan sasaran pembangunan pendidikan seperti yang tersebut di atas, dikembangkan arah kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Perencanaan urusan pendidikan berbasis kinerja
2. Pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan
3. Evaluasi kinerja dinas pendidikan
4. Inovasi pelayanan publik
5. Peningkatan kapasitas SDM
6. Pembuatan SOP pelayanan
7. Peningkatan akses, kuantitas, kualitas sarana prasarana, kurikulum.
8. Peningkatan kualitas peserta didik
9. Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas PTK

Tabel II - 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

VISI	: Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman)			
MISI	: Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatnya kualitas dan pemerataan penyelenggaraan Pendidikan	Meningkatkan akses seluas-luasnya kepada masyarakat,	Peningkatan akses pendidikan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana
			Meningkatkan kualitas peserta didik	Peningkatan kualitas peserta didik
			Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas PTK	Pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan miskin
				Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas PTK

		Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal dan informal	Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan nonformal dan informal	Pendampingan agar lembaga mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Daya saing Pemuda	Meningkatkan kualitas pemuda	Peningkatan wira usaha muda
		Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Menyusun perencanaan dan pengendalian pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja dinas pendidikan	Perencanaan urusan pendidikan berbasis kinerja
				Pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan
				Evaluasi kinerja dinas Pendidikan
			Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	Inovasi pelayanan publik Peningkatan kapasitas SDM
				Pembuatan SOP pelayanan

c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran pada program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju periode tahun 2021-2026 adalah:

Tabel II - 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
			2022	2023	2025	2025	2026			2022	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55	Meningkatnya kualitas dan pemerataan penyelenggara an pendidikan	APK PAUD	55.97	56.47	56.97	57.47	57.97
									APK SD/MI,	100	100	100	100	100
									APK SMP/MTs	97.66	98.16	98.66	99.16	99.66
									APM SD/MI,	100	100	100	100	100
									APM SMP/MTs	88.52	89.02	89.52	90.02	90.52
									Rata-rata lama sekolah	9	9	9	9	9
									Harapan lama sekolah	12	12	12	12	12
									Nilai rata-rata hasil ujian SD/MI	236,18	236,20	236,21	236,21	236,22
									Nilai rata-rata hasil ujian SMP/MTs	261,66	261,68	261,70	261,70	261,71
									APS SD Sederajat	98.60	98.90	99.20	99.50	99.80
									APS SMP sederajat	80.60	80.90	81.20	81.50	81.80
								Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Guru atau Tenaga Pendidik Dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua jenjang pendidikan dan pendidikan non formal	87.22	88.09	88.97	89.86	90.76
									Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar	20%	30%	40%	50%	60%
									Persentase Wirausaha Pemuda yang Mandiri	10%	10%	10%	15%	20%
								Terselenggaran ya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	CC	B	B	BB	A

d. **Perjanjian Kinerja (PK)**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025 dijabarkan pada lampiran Perjanjian Kinerja yang tercantum pada Lampiran 1.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DR. HJ. KHATMAH AHMAD, S.Pi., M.Si**

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR.HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si**

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR.HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si



DR. HJ. KHATMAH AHMAD, S.Pi., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Predikat AKIP	BB
2.	Meningkatnya aksesibilitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan akses layanan sarana dan prasarana dibidang Pendidikan dalam kondisi baik	77.78 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan layanan dalam peningkatan Mutu/SDM dibidang Pendidikan	71.76 %
4.	Meningkatnya aksesibilitas layanan Kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan	83.33 %
5.	Meningkatnya kualitas dibidang kepemudaan	Persentase kewirausahaan pemuda yang mandiri	75 %
6.	Meningkatnya aksesibilitas dibidang olahraga	Persentase ketersediaan dan faslitas olahraga sesuai standar	66.67 %
7.	Meningkatnya kualitas dibidang olahraga	Persentase atlet yang beprestasi	75 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 309.553.065.930,-
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 103.518.161.086,-
3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 63.368.500,-
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 66.553.400,-
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 3.445.860.400,-
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 7.006.984.655,-
Jumlah	Rp. 423.653.993.971,-

Mamuju, Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR.HJ. SITI SUTINAH SUHARDI, SH, M.Si



DR. HJ. KHATMAH AHMAD, S.Pi., M.Si

Perjanjian Kinerja Setelah direvisi Tahun 2025
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	FORMULASI
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Predikat AKIP	BB	Predikat Akuntabilitas Instansi Pemerintah diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Predikat akuntabilitas ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja instansi pemerintah dan dibagi menjadi beberapa kategori
2	Meningkatnya aksesibilitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan akses layanan sarana dan prasarana dibidang Pendidikan dalam kondisi baik	77.78 %	Jumlah sekolah semua jenjang pendidikan (PAUD,SD,SMP, dan NonFormal/kesetraan) baik negeri maupun swasta di Kab.Kota / Jumlah Sekolah yang di bangun atau direhabilitasi X 100%
3	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan layanan dalam peningkatan Mutu/SDM dibidang Pendidikan	71.76 %	Jumlah sekolah yang terakreditasi (akreditasi A,B,C) disemua jenjang berdasarkan kewenangan Kab.Kota / Jumlah Sekolah semua jenjang pendidikan berdasarkan kewenangan Kab.Kota X 100 %
4	Meningkatnya aksesibilitas layanan Kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan	83.33 %	Jumlah sarana dan prasarana (Unit) pemuda target dalam 1 tahun dibangun / jumlah sarana dan prasarana pemuda yang direncanakan dalam sampai dengan tahun 2026 (Unit) direncanakan X 100 %
5	Meningkatnya kualitas dibidang kepemudaan	Persentase kewirausahaan pemuda yang mandiri	75%	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan / total keseluruhan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 x 100 %
6	Meningkatnya aksesibilitas dibidang olahraga	Persentase ketersediaan dan faslitas olahraga sesuai standar	66.67 %	Jumlah sarana dan prasarana olahraga (Unit) yang dibangun / jumlah target sarana dan prasarana olahraga yang direncanakan dalam sampai dengan tahun 2026 (Unit) X 100 %
7	Meningkatnya kualitas dibidang olahraga	Persentase atlet yang berprestasi	75%	Jumlah event olahraga yang diselenggarakan / jumlah cabang olahraga yang ada di Kab.Kota

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	2	3	4
Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang disemua jenjang pendidikan	Persentase sarana dan perasarana dalam kondisi baik disemua jenjang	77,78	Persen
Tersedianya peningkatan mutu pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar,Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi	71,76	Persen
Tersedianya kurikulum Pelajaran Muatan Lokal di semua jenjang pendidikan	Persentase Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	100	Persen
Tersedianya dokumenPenerbitan Izin di Satuan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar,Menengah, PAUD dan NonFormal yang memenuhi syarat penerbitan izin disatuan pendidikan	93,80	Persen
Tersedianya pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan	83,33	Persen
Meningkatnyadaya saing pemuda	Persentase Organisasi Pemuda Yang Terfasilitasi dalam kewirausahaan	75	Persen
Tersedianya saran dan prasarana olahraga sesuai dengan standar	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia	66,67	Persen
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga dijenjang pendidikan Daerah Kabupaten/Kota	83,33	Persen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
Tersusnya laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja Perangkat daerah	100	Persen
Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik dan ankuntabel	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	Persen
Tersedianya dokumen Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen
Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	Persen
Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100	Persen
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100	Persen
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	88,46	Persen
Terlaksananya Pengelolaansekolah dasar yang berstandar nasional	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	92,59	Persen
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama	87,50	Persen
Terlaksananya Pengelolaansekolah menengah pertama yang berstandar nasional	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	90,91	Persen
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikanPAUD	Persentase sarana dan prasarana pendidikan PAUD	66,67	Persen
Terlaksananya PengelolaanPAUD yang berstandar nasional	Persentase PAUD yang terakreditasi	96,51	Persen
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan NonFormal	Persentase sarana dan prasarana pendidikan NonFormal	66,67	Persen
Terlaksananya Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berstandar nasional NonFormal	Persentase Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	94,74	Persen
Tersedianya kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyusunanPerhitungan dan Pemetaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	Persen
Tersedianya dokumen Penerbitan Izin Pendidikan PAUD	Persentase izin pendidikan PAUD yang diterbitkan	33,33	Persen
Terfasilitasnya pemuda dalam peningkatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	50	Persen
Terlaksananya penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah Kab/Kota	83,33	Persen
Tersedianya Organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	Persentase Organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	100	Persen
Tersedianya Sarana Pembinaan dan Pengembangan olahraga Rekreasi	Persentase Sarana Pembinaan dan Pengembangan olahraga Rekreasi	66,67	Persen

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju telah melaksanakan 6 program termasuk didalamnya program rutin dan program berbasis kinerja dan 17 kegiatan 103 Sub Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp. 423.653.993.971,- terdiri dari DAU Rp. Total DAK sebesar Rp. 53.828.154.265 antara lain DAK fisik Rp. 1.182.013.000,- dan DAK non Fisik sebesar Rp 52.646.141.265,- sedangkan DAU sebesar Rp. 369.825.839.706,- dan Pendapatan daerah sebesar Rp. 50.000.000,-

Tabel Rincian belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	50,000,000.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	50,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	50,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	50,000,000.00
5	BELANJA DAERAH	423,653,993,971.00
5.1	BELANJA OPERASI	366,995,746,794.00
5.1.01	Belanja Pegawai	308,767,521,440.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47,543,209,354.00
5.1.05	Belanja Hibah	10,685,016,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	366,995,746,794.00
5.2	BELANJA MODAL	56,658,247,177.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,375,624,265.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,443,804,412.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,838,818,500.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	56,658,247,177.00
	JUMLAH BELANJA	423,653,993,971.00

BAB III

ANKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja OPD

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai 2 capaian indicator yaitu :

- d. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel III.1

Indikator Capaian SPM 2025 Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 dan

Indikator Kinerja Kemendikbudristek

No	INDIKATOR SPM	JENJANG	TAHUN 2025			
			Target	Realisasi	Turun/Naik	Capaian %
1	Angka Partisipasi Sekolah 5 sd 6	PAUD	83.16	78.20	-4.96	94.04
2	Proporsi guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	61.78	67.89	6.11	109.89
3	Proporsi jumlah stauan PAUD terakreditasi minimal B	PAUD	49.64	34.38	-15.26	69.26
4	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 15	SD/SMP	96.15	95.90	-0.25	99.74
5	Iklm Kebinekaan	SD	70.54	64.10	-6.44	90.87
6	Iklm keamanan	SD	74.72	72.43	-2.29	96.94
7	Iklm Inklusivitas	SD	60.07	57.48	-2.59	95.69
8	Kemampuan Numerasi	SD	51.75	44.21	-7.54	85.43
9	Kemampuan Literasi	SD	55.2	49.77	-5.43	90.16
10	Iklm Kebinekaan	SMP	70.26	65.88	-4.38	93.77
11	Iklm kemanan	SMP	69.01	67.8	-1.21	98.25
12	Iklm Inklusivitas	SMP	56.86	57.07	0.21	100.37
13	Kemampuan Numerasi	SMP	56.36	57.50	1.14	102.02
14	Kemampuan Literasi	SMP	58.86	62.13	3.27	105.56
15	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 18	Kesetaraan	36.81	24.62	-12.19	66.88

A. Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Surat Target dan Realisasi SPM Kab. Mamuju Tahun 2026 sd 20230

Surat KEMENDIKDASMEN Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 untuk Kabupaten Mamuju ada 15 inidkator antara lain :

- **Pendidikan anak usia dini**

Merupakan satauan satuan pendidikan yang meneyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 5 sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidkan usia dini mempunyai 3 indikator antara lain :

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun

Jumlah anak dengan rentang usia tertentu yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak dengan rentang usia tersebut pada daerah yang bersangkutan target 83.16 % dengan capaian realisasi sebesar 78.20 % yaitu jumlah penduduk dengan usia 5 sd 6 tahun sebanyak

dengan jumlah anak yang berpartisipasi atau sedang belajar baik Pendidikan kelompok Bermain (KB), Tamana kanank-kanak (TK), taman penitipan anak (TPA). Jika dilihat progres antara target dengan realisasi turun 4.96 % atau hanya mencapai 94.04 %

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kondisi geografis atau kondisi medan antara jarak rumah dengan sekolah terutama kondisi daerah pedalaman.
2. Sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai masih banyak sekolah berstatus swasta dan belum terakreditasi minimal B
3. Rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD
Belum semua orang tua memahami pentingnya PAUD, rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dapat dipengaruhi banyak hal. Misalnya faktor pendidikan orang tua, faktor sosial, dan faktor ekonomi.

b. Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B

Merupakan jumlah satuan pendidikan PAUD yang telah terakreditasi minimal B dengan target 61.78 % dengan capaian 67.89 % atau melebihi target sebesar 6.11 % atau realisasi kinerja sebesar 109.89 %.

Jumlah PAUD diKab. Mamuju sebanyak 194 lembaga negeri 27 lembaga dan swasta 167 lembaga dengan jumlah lembaga terakreditasi sebanyak 149 lembaga baik akreditasi A,B dan C. Sedangkan lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B sebanyak 66 lembaga sedangkan Lembaga terakreditasi C sebanyak 125 lembaga dan Lembaga yang belum terakreditasi sebanyak 3 lembaga.

c. Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4

Jumlah pendidik PAUD dengan kualifikasi Pendidikan D4/S1 target pada tahun 2025 sebesar 49.64 % dengan capaian 34.38 % turun 15.26 % atau capaian kinerja hanya 69.26 %

Saat ini jumlah pendidik dengan kualifikasi pendidikan bisa dikatakan masih jauh dari harapan seharusnya semua pendidik sudah memenuhi kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 untuk peningkatan kompetensi para pendidik sehingga dibutuhkan perhatian berupa pemberian bea siswa bagi guru agar melanjutkan kejenjang minimal D4/S1.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Tidak semua daerah memiliki program studi Pendidikan Anak Usia Dini di perguruan tinggi terdekat
2. Banyak guru PAUD berstatus honorer atau tenaga sukarela sehingga motivasi dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan menjadi terbatas
3. Sebagian lembaga PAUD masih memprioritaskan pengalaman mengajar dibandingkan kualifikasi akademik.

- **Pendidikan Dasar**

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan usia dari 7 sd 15 tahun atau program pendidikan 9 tahun dijenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Indikator kinerja pendidikan dasar antara lain :

- a. Angka partisiapsi sekolah usia 7 sd 15 tahun adalah target tahun 2025 adalah sebesar 96.15 % dengan realisasi 95.90 % atau turun 0.25 % dengan capaian kinerja masih 99.74 %.

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Mamuju sesuai data DUKCAPIL sebesar 52.153 Jiwa antara lain usia 7 sd 12 tahun sebesar 34.639 jiwa dan usai 13 sd 15 tahun sebesar 17.514 jiwa.

Hal ini disebabkan antara lain :

1. Faktor sosial dan ekonomi yaitu Kondisi ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan anak harus bekerja atau membantu orang tua sehingga tidak melanjutkan sekolah Faktor sosial dan ekonomi seperti pernikahan diusia muda, anak yang bekerja membantu perekonomian keluarga dan sebagian pemahaman orang tua bahwa anak yang sudah bersekolah dijenjang SD/Mi sudah mempunyai dasar membaca dan menulis dan tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan Biaya tidak langsung pendidikan seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah masih menjadi beban bagi sebagian keluarga bahkan Sebagian masyarakat lebih memprioritaskan anak untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah
2. Pernikahan usia dini yang menyebabkan anak berhenti sekolah
3. Anak yang pernah putus sekolah karena faktor ekonomi, keluarga, atau lingkungan sering tidak kembali ke sekolah

- b. Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP

Literasi adalah keterampilan kunci untuk masa depan karena kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk memahami, menganalisa dan menggunakan informasi secara efektif. Kontribusi skor kemampuan literasi berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. Kemampuan literasi SD secara umum dengan target sebesar 55.20 % dengan capaian realisasi 49.77 % turun 5.43 % atau capaian kinerja hanya 90.16 %
2. Kemampuan literasi SMP secara umum dengan target sebesar 58.86 % dengan capaian realisasi 62.13 % naik 3.27 % atau capaian kinerja 105,56 %

c. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP

Memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Kontribusi skor kemampuan numerasi berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. Kemampuan numerasi SD secara umum dengan target sebesar 51.75 % dengan capaian realisasi 44.21 % atau hanya capaian sebesar 85.43 % turun 7,54 %.
2. Kemampuan numerasi SMP secara umum dengan target sebesar 56.36 % dengan capaian realisasi 57.50 %. Naik 3.27 % atau realisasi kinerja sebesar 102.02 %

d. Skor Iklim Inklusivitas SD dan SMP

inklusivitas adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberbedaan dan keberagaman. Sebagai contoh, penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus harus diperlakukan secara setara, tidak diskriminatif dan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Kontribusi skor Iklim Inklusivitas berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim Inklusivitas SD secara umum dengan target sebesar 60.07 % dengan capaian realisasi 57.48 % turun 2.59 % atau capaian realisasi sebesar 95.69 %
2. skor Iklim Inklusivitas SMP secara umum dengan target sebesar 56.86 % dengan capaian relaisasi 57.07 atau naik 0.21 % dengan capaian kinerja sebesar 100.37 %

e. Iklim Keamanan

Iklim keamanan adalah kondisi satuan pendidikan yang memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga satuan pendidikan, baik secara fisik maupun psikologis. Kontribusi skor Iklim Keamanan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim keamanan SD secara umum dengan target sebesar 74.72 % dengan capaian realisasi 72.43 % atau turun 2.29 % dengan capaian kinerja sebesar 96.94 %
2. skor Iklim keamanan SMP secara umum dengan target sebesar 69.01 % dengan capaian relaisasi 67.80 % turun 1.21 % dengan capaian kinerja sebesar 98.25 %

f. Iklim Kebinekaan

Merupakan suatu bentuk layanan pendidikan yang mengenalkan berbagai macam perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai modal dan potensi untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan, sehingga tercipta suasana hidup yang lebih indah, lebih lengkap, hidup rukun, toleran, dan harmoni. Kontribusi skor Iklim Kebinekaan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim Kebinekaan SD secara umum dengan target sebesar 70.54 % dengan capaian realisasi 64.10 % atau turun 6.44 % dengan capaian realisasi sebesar 90.87 %
2. skor Iklim Kebinekaan SMP secara umum dengan target sebesar 70.26 % dengan capaian relaisasi 65.88 % turun 4.38 % dengan capaian realsiasi sebesar 93.77 %

g. Kesenjangan

Pendidikan Kesenjangan adalah Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakupi program paket A, paket B, dan paket C serta pendidikan kejuruan setara sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang berbentuk paket C kejuruan.

Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun kesetaraan dengan target 36.81 % dengan capaian 24.62 % dengan capaian realisasi sebesar 66.88 %.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi masih rendahnya APS kesetaraan in antara alian :

1. Sebagian masyarakat masih kurang memahami bahwa pendidikan kesetaraan memiliki nilai yang setara dengan pendidikan formal Faktor ekonomi dan kemiskinan yang menyebabkan anak harus menjadi tulang punggung keluarga atau membantu perekonomian
2. Peserta didik usia sekolah sering harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga sulit mengikuti kegiatan belajar Faktor ketersediaan dan distribusi guru yang belum merata sehingga rasio guru dan murid tidak sebanding
3. Jumlah tutor yang memiliki kompetensi memadai masih terbatas dan Informasi tentang program kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat

B. Indikator Kinerja Utama OPD

Indiaktor kinerj utama adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai evektifitas dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai alat evaluasi unutm mengukur sejauh mana kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai 3 sasaran strategis dengan 15 indikator sebagai dasar melaksanakan program kegiatan pada tahun 2025 berikut rincian indikator kinerj utama Dinas Pendidikan Pmenuda dan Olahraga sebagai berikut :

Tabel III.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebelum revisi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	
1	SS 1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan	APK PAUD	57.47	67.04	116.65
		APK SD/MI	100	98.18	98.18
		APK SMP/MTs	99.16	80.54	81.22
		APM SD/MI	100	90.78	90.78
		APM SMP/MTs	90.02	73.68	81.85
		Rata-Rata Lama Sekolah	9	8.71	96.78
		Harapan Lama Sekolah	12	13.30	110.83
		Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SD/MI	236.21	78.5	78.50
		Nilai Rata-Rata Hasil Ujian SMP/MTs	260.70	80.84	80.84
		APS SD Sederajat	99.50	98.67	99.17
		APS SMP Sederajat	81.50	87.90	107.85
		Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal	89.86	81.80	91.03
2	SS 2. Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar	50	40.74	81.48
		Persentase Wirausaha Pemuda yang Mandiri	15	5.18	34.53
3	SS 3. Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	BB	-	Menunggu LHE Inspektorat

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Angka partisipasi kasar (APK) PAUD adalah jumlah anak yang bersekolah dijenjang pendidikan PAUD baik dibawah usia 5 tahun atau diatas 6 tahun baik Pendidikan kelompok Bermain (KB), Tamana kanank-kanak (TK), taman penitipan anak (TPA) sedangkan berdasarkan kewenangan Kementrian Agama ada Raudlatul Athfal (RA). Adapun target sebesar 57.47 % dengan realisasi sebesar 67.04 %

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 berdasarkan data DISDUKCAPIL sebanyak 11.970 jika dan jumlah anak usia 5 sd 6 tahun yang bersekolah berdasarkan data DAPODIK Kab.Mamuju dan EMIS Depag sebanyak 8.025 siswa atau 67.04 %, walapun mencapai target tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk usia 5 sd 6 tahun dengan jumlah usia sekolah masih ada sekitar 3.945 jiwa yang belum terdata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Masih ada lembaga PAUD yang belum terdaftar di Dapodik dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya data partisipasi pendidikan anak usia dini salah satunya Lembaga PAUD belum memiliki izin operasional
 2. Kondisi geografis atau kondisi medan antara jarak rumah dengan sekolah terutama kondisi daerah pedalaman.
 3. Sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai masih banyak sekolah berstatus swasta dan belum terakreditasi minimal B
 4. Rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD Belum semua orang tua memahami pentingnya PAUD, rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dapat dipengaruhi banyak hal. Misalnya faktor pendidikan orang tua, faktor sosial, dan faktor ekonomi.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- Angka partisipasi kasar SD/MI adalah jumlah anak yang bersekolah dijenjang Pendidikan sekolah dasar baik dibawah usia 7 tahun sampai dengan diatas 12 tahun dengan target sebesar 100 % sedangkan pada tahun 2025 capain angka partisipasi kasar jenjang sekolah dasar sebesar sebesar 98.18 %.
- Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 berdasarkan data DISDUKCAPIL sebanyak 34.639 jiwa dengan jumlah anak usia 7 sd 12 tahun yang bersekolah berdasarkan data DAPODIK Kab.Mamuju (SD sebanyak 32.001 siswa) dan EMIS Depag (MI sebanyak 2176) sebanyak 34.008 siswa atau sebesar 98.18 % Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
- a. Masih adanya anak yang belum masuk sekolah atau putus sekolah Sebagian anak tidak melanjutkan atau berhenti sekolah karena berbagai alasan
 - b. Anak membantu orang tua bekerja sehingga tidak melanjutkan sekolah
 - c. Anak pindah daerah tetapi belum terdata atau belum melanjutkan sekolah di tempat baru
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- Angka partisipasi kasar SMP/MTs jumlah anak yang bersekolah dijenjang Pendidikan sekolah menengah pertama baik dibawah usia 13 tahun sampai dengan diatas 15 tahun dengan target sebesar 99.16 % dengan capaian sebesar 80.54 %.
- Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kab.Mamuju berdasarkan data DUKCAPIL usia 13 sampai dengan 15 tahun sebesar 17.514 jiwa dan jumlah usai 13 sd 15 tahun bersekolah sebanyak 14.106 atau 80.54 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Kondisi Ekonomi Keluarga: Banyak keluarga yang kurang mampu menyediakan biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya dan juga anak ikut membantu perekonomian keluarga
 - b. Jarak Tempuh dan Aksesibilitas: Sekolah yang terlalu jauh dari rumah atau kurangnya fasilitas transportasi mempengaruhi partisipasi siswa kondisi geografis apalagi di daerah 3 T.
 - c. Kualitas Pendidikan: Kurangnya kualitas pendidikan di sekolah, termasuk kurangnya guru yang kompeten dan fasilitas yang memadai, dapat membuat orang tua memilih untuk tidak mengirim anak mereka ke sekolah
 - d. Persepsi dan Nilai Pendidikan: Beberapa orang tua mungkin tidak melihat pentingnya pendidikan menengah pertama atau memiliki pandangan yang kurang mendukung terhadap pendidikan formal dan adanya pernikahan dini.
 - e. Masalah Kesehatan dan mental: Masalah kesehatan yang serius atau kronis pada anak-anak dapat menghambat partisipasi mereka dalam Pendidikan dan juga masalah iklim keamanan Dimana anak menjadi korban bullying disekolah sehingga trauma dan tidak ingin bersekolah
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- Angka partisipasi murni SD/MI adalah jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan usia dijenjang Pendidikan sekolah dasar antara 7 sampai dengan 12 tahun dengan target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 90.78 %. Dengan jumlah siswa sesuai usia 7 sd 12 tahun sebanyak 31.444 siswa sedangkan jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun sebanyak 34.639 jiwa atau 90.78 %
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
- Angka partisipasi murni SMP/MTs jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan usia dijenjang Pendidikan sekolah menengah pertama di usia 13 tahun sampai dengan 12 tahun dengan target sebesar 90.02 % dengan capaian realisasi sebesar 73.68 %
- Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kab.Mamuju berdasarkan data DUKCAPIL usia 13 sampai dengan 15 tahun sebesar 17.514 sedangkan jumlah siswa yang sedang belajar dijenjang Pendidikan sekolah menengah pertama baik itu Sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar 12.905 siswa
6. Rata-rata lama sekolah
- Pada Tahun 2025 target rata rata lama sekolah adalah 9 tahun dengan capain realisasi rata rata lama sekolah 8.71 Tahun atau semakin kecil nilai rata rata harapan sekolah berarti semakin besar peluang menamatkan pendidikan sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 baru mencapai 8.71 tahun yang artinya

secara rata-rata penduduk kabupaten Mamuju yang berusia 15 tahun keatas telah menamatkan pendidikan kelas 2 SMP .

7. Harapan lama sekolah

Target harapan lama sekolah yaitu usia 12 tahun dengan capaian lama sekolah 13.29 tahun atau semakin kecil nilai rata rata harapan sekolah berarti semakin besar peluang menamatkan pendidikan. Harapan lama sekolah Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 telah mencapai 13,30 tahun yang berarti secara rata-rata anak usia tujuh tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,30 tahun atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pendidikan level perguruan tinggi tahun pertama.

8. Nilai rata-rata hasil ujian SD/MI

Target ujian nasional pada tahun 2025 yaitu 236,21 namun disaat pendemi covid 19 tahun 2021 ujian nasional sudah ditiadakan sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus dan diganti menjadi ujian semester. Pada tahun 2025 nilai ujian rata-rata dari 312 sekolah dasar sebesar 78.50 nilai

9. Nilai rata-rata hasil ujian SMP/MTs

Target ujian nasional pada tahun 2025 yaitu 260.70 namun disaat pendemi covid 19 tahun 2021 ujian nasional sudah ditiadakan sesuai dengan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus dan diganti menjadi ujian semester. Pada tahun 2025 nilai ujian rata-rata menengah pertama sebesar 80.84 dari 65 sekolah .

10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Sederajat

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid yang sedang bersekolah diberbagai dijenjang pendidikan seperti SD/Mi/Kesetaraan Paket A. Angka partisipasi sekolah SD/Mi/Sederajat dengan target sebesar 99.50 % dengan capaian relisasi sebesar 98.67 % Semakin tinggi angka partisipasi sekolah berarti makin banyak yang bersekolah disuatu daerah.

11. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid yang sedang bersekolah diberbagai dijenjang pendidikan seperti SMP/MTs/Kesetaraan Paket B. Angka partisipasi sekolah SMP sederajat dengan target sebesar 81.50 % dengan capaian sebesar 87.90 % atau sekitar 15.395 anak yang sedang bersekolah baik di jenjang pendidikan formal maupun non formal.

12. Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal

Kualifikasi minimal D.IV/S1 menjadi salah satu syarat penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas proses pembelajaran. Guru yang memiliki kualifikasi akademik tersebut diharapkan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang lebih baik sehingga mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif, inovatif, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik

Pada tahun 2025 target kinerja untuk Persentase Guru atau Tenaga Pendidik dengan Kualifikasi Minimal D.IV/S1 disemua Jenjang Pendidikan dan Pendidikan Non formal sebesar 89.86 % dengan realisasi 81.80 % dengan realisasi capaian sebesar 91.03 %. Jumlah guru di Kab.Mamuju status ASN dan PPPK sebanyak 4.604 guru dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 sebanyak 3.766 guru atau 81.80 %.

Rendahnya kualifikasi akademik guru tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya guru lama yang diangkat ketika persyaratan kualifikasi belum mengharuskan minimal D.IV/S1, keterbatasan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, faktor usia, keterbatasan biaya pendidikan, serta lokasi tempat tugas yang jauh dari perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan guru.

13. Persentase Prestasi Olah Raga Pelajar

Pada tahun 2025 target prestasi olahraga pelajar sebesar 50 % dengan realisasi sebesar 40.74 % atau capaian kinerja sebesar 81.48 % yaitu jumlah atlet pelajar yang mendapatkan medali dalam event olahraga tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama antara lain :

- a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2sn) Jenjang SD sebanyak 6 mendali dari cabor lomba karate putra (4 mendali)
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2sn) Jenjang SMP sebanyak 2 mendali dari pencat silat putra dan putri

14. Persentase Wirausaha Pemuda yang Mandiri

Pada tahun 2025 target Wirausaha Pemuda yang Mandiri sebesar 15 % dengan capaian realisasi sebesar 5.18 % atau jumlah pemuda yang berwirausaha dengan usai produktif sebanyak 4.209 pemuda dari jumlah pemuda usia 16 sd 30 tahun sebanyak 81.243 UMKM diKabupaten Mamuju.

15. Terselenggaranya Birokrasi OPD yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima.

Saat ini penilaian atas evaluasi SAKIP diinspektorat masih dalam tahap permintaan dokumen data dukung SAKIP OPD dan menjadi hasil evaluasi dan rekomendasi dari inspektorat dilakukan beberapa perbaikan sperti :

- a. Dokumen perencanaan segera diformilkan dan dipublikasikan emlalui website resmi opd
- b. Membuat laporan pemantauan kinerja disusun secara berkala triwulan
- c. Melengkapi Indikator kinerja utama dengan sumber data yang baik dan benar
- d. Membuat laporan kinerja perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama OPD setelah direvisi

Tabel III.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah revisi Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	KET
1	2	3	4	5	5
1	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Predikat AKIP	BB	B (66.95)	Nilai AKIP DIKPORA No.700.04/62/IV/2025/Insp. Tgl 1 April 2026
2	Meningkatnya aksesibilitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan akses layanan sarana dan prasarana dibidang Pendidikan dalam kondisi baik	77,78	51,11	Ruang kelas kondisi baik/sedang 1.950 unit dari 3111 unit dengan jumlah 595 sekolah semua jenjang
3	Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	Persentase cakupan layanan dalam peningkatan Mutu/SDM dibidang Pendidikan	71.76 %	42,36	Jumlah sekola terakreditasi A,B,C sebanyak 252 dari 595 sekolah disemua jenjang
4	Meningkatnya aksesibilitas layanan Kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan	83.33 %	33,33	Jumlah asrama pemuda telah diperbaiki sebanyak 2 unit dari target 4
5	Meningkatnya kualitas dibidang kepemudaan	Persentase kewirausahaan pemuda yang mandiri	75%	41,67	Junlah pemuda yang dilatih sebanyak 50 orang dari target 120 pemuda
6	Meningkatnya aksesibilitas dibidang olahraga	Persentase ketersediaan dan faslitas olahraga sesuai standar	66.67 %	71,43	Jumlah sarana olahraga yang dibangun sebanyak 7 unit dari Target 5 unit sarana olahraga yang dibangun
7	Meningkatnya kualitas dibidang olahraga	Persentase atlet yang berprestasi	75%	33,33	Jumlah atelet pelajar yang mendapatkan mendali event o2sn sebanyak 20 orang dari target 40 orang

URUSAN	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	KET
URUSAN WAJIB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Target Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Secara Akuntabel	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	99,26	Ada 1 kegiatan belanja cetak dan penggandaan (spanduk dan karanagan bunga) tidak direalisasikan krn telah terakomodir dikegiatanlain dan ifisiensi anggaran
URUSAN PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang disemua jenjang pendidikan	Persentase sarana dan perasarana dalam kondisi baik disemua jenjang	77,78	Persen	51,11	Ruang kelas kondisi baik/sedang 1.950 unit dari 3111 unit dengan jumlah 595 sekolah semua jenjang
		Tersedianya peningkatan mutu pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar,Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi	71,76	Persen	42,36	Sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 252 dari 595 sekolah disemua jenjang masih banyak sekolah yang terakreditasi C
URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tersedianya kurikulum Pelajaran Muatan Lokal di semua jenjang pendidikan	Persentase Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	100	Persen	100	Terbitnya pelajaran muatan lokal yaitu bahasa mamuju
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tersedianya dokumenPenerbitan Izin di Satuan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar,Menengah, PAUD dan NonFormal yang memenuhi syarat penerbitan izin disatuan pendidikan	93,80	Persen	41,94	sekolah swasta yang yang terdaftar didapodik sebanyak 203 dari target 484 ijin yang diterbitkan/diperbaharui
URUSAN PEMUDA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tersedianya pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan	Persentase sarana dan prasarana kepemudaan	83,33	Persen	33,33	Jumlah asrama pemuda telah diperbaiki sebanyak 2 unit dari target 4 dari 6 unit sd tahun 2026
		Meningkatnyadaya saing pemuda	Persentase Organisasi Pemuda Yang Terfasilitasi dalam kewirausahaan	75	Persen	41,67	Junlah pemuda yang dilatih sebanyak 50 orang dari target 120 pemuda
URUSAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Tersedianya saran dan prasarana olahraga sesuai dengan standar	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia	66,67	Persen	71,43	Jumlah sarana olahraga yang dibangun sebanyak 7 unit dari Target 5 unit sarana olahraga yang dibangun
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga dijenjang pendidikan Daerah Kabupaten/Kota	83,33	Persen	70	Jumlah target event olahraga yang diikut dari target 10 event/cabor tahun 20225 dan sd 2026 sebanyak 12 event hanya 7 event/cabor yang diikuti disebabkan kurangnya atletik yang berprestasi

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	KET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja Perangkat daerah	100	Persen	100	sesuai target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik dan ankuntabel	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	100	Persen	100	sesuai target
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen	100	sesuai target
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100	Persen	100	sesuai target
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	100	Persen	94,12	kegiatan belanja cetak dan penggandaan (spanduk dan karanagan bunga) tidak direalisasikan krn telah terakomodir dikegiatanlain dan ifisiensi anggaran
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persen	100	sesuai target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100	Persen	100	sesuai target
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	88,46	Persen	75	Target sekolah yang dibangun/rehabilitasi sebanyak 180 unit sedangna capaian realisasi sebanyak 135 unit dari 312 sekolah
	Terlaksananya Pengelolaansekolah dasar yang berstandar nasional	Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	92,59	Persen	81,67	Target sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 180 sekolah dengan realisasi sebanyak 147 sekolah dari 312 sekolah disebabkan masih banyaknya sekolah yang berakkreditasi C
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama	87,50	Persen	102	Target sekolah yang dibangun/rehabilitasi sebanyak 30 unit sedangkan capaian realisasi sebanyak 41 unit dari 65 sekolah SMP
	Terlaksananya Pengelolaansekolah menengah pertama yang berstandar nasional	Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	90,91	Persen	60,42	Target sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 48 sekolah dengan realisasi sebanyak 29 sekolah dari 64 sekolah hal ini disebabkan masih banyaknya sekolah yang berakkreditasi C
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikanPAUD	Persentase sarana dan prasarana pendidikan PAUD	66,67	Persen	54,05	Target sekolah yang dibangun/rehabilitasi sebanyak 37 unit sedangkan capaian realisasi sebanyak 20 unit dari 193 sekolah PAUD
	Terlaksananya PengelolaanPAUD yang berstandar nasional	Persentase PAUD yang terakreditasi	96,51	Persen	18,01	Target sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 161 sekolah dengan realisasi sebanyak 29 sekolah PAUD dari 193 sekolah hal ini disebabkan masih banyaknya sekolah yang berakreditasi C hal ini disebabkan salah satu

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	KET
						faktor SDM dan internal manajemen sekolah
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan NonFormal	Persentase sarana dan prasarana pendidikan NonFormal	66,67	Persen	33	Target sekolah yang dibangun/rehabilitasi sebanyak 2 unit sedangkan capaian realisasi sebanyak 1 unit dari 23 sekolah nonformal hal ini disebabkan banyak diantara status tanah masih milik pribadi bukan hibah atau aset daerah
	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan yang berstandar nasional NonFormal	Persentase Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	94,74	Persen	84,21	Target sekolah yang terakreditasi minimal B sebanyak 17 sekolah dengan realisasi sebanyak 16 sekolah nonformal dari 23 kolah hal ini disebabkan masih banyaknya sekolah yang berakreditasi C hal ini disebabkan salah satu faktor SDM dan internal manajemen sekolah
Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyusunanPerhitungan dan Pemetaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	Persen	100	Terbitnya pelajaran muatan lokal yaitu bahasa mamuju
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersedianya dokumen Penerbitan Izin Pendidikan PAUD	Persentase izin pendidikan PAUD yang diterbitkan	33,33	Persen	26,67	Target sekolah yang mengajukan penerbitan ijin operasional sebanyak 10 dengan realisasi capaian 4 hal ini disebabkan banyak dokumen yang tidak memenuhi syarat
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemuda dalam peningkatan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	50	Persen	41,67	Target pemuda yang dilatih sebanyak 120 orang dengan realisasi sebanyak 50 orang
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah Kab/Kota	83,33	Persen	70	Jumlah target event olahraga yang diikuti dari target 10 event/cabor tahun 20225 dan sd 2026 sebanyak 12 event hanya 7 event/cabor yang diikuti disebabkan kurangnya atletik yang berprestasi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Tersedianya Organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	Persentase Organisasi olahraga yang dibina dan dikembangkan	100	Persen	100	Fasilitasi organisasi olahraga yaitu KONI
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tersedianya Sarana Pembinaan dan Pengembangan olahraga Rekreasi	Persentase Sarana Pembinaan dan Pengembangan olahraga Rekreasi	66,67	Persen	46,67	Target 15 Unit sarana olahraga sesuai standar dengan realisai 7 unit yang dibangun/rehabilitasi tahun2025 disebabkan kondisi anggaran

Berdasarkan perjanjian kinerja (PK) eselon II ada 6 sasaran startegis dari 3 urusan antara lain :

1. Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif,efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima diwujudkan melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berfokus pada pencapaian kinerja dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat, OPD terus melakukan perbaikan terhadap sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

Upaya perbaikan tersebut diarahkan pada penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan capaian kinerja sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, OPD juga meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses bisnis, optimalisasi standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan surat Inspektorat Daerah tanggal 1 April tahun 2026 nomor : 700.04/62/IV/2025/Insp. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju, memperoleh kategori Baik (B) dengan nilai sebesar 66,95 dengan intepretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 dan telah dilakukan tindak lanjut LHE saki.

2. Meningkatnya aksesibilitas layanan Pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan ditunjukkan melalui peningkatan persentase cakupan sarana dan prasarana pendidikan yang berada dalam kondisi baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan yang merata, aman, dan berkualitas. Ketersediaan ruang kelas, ruang penunjang, sanitasi, akses air bersih, jaringan listrik, perabot, serta fasilitas pembelajaran yang memenuhi standar menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik dan pendidik.

Dengan meningkatnya persentase cakupan sarana dan prasarana pendidikan

dalam kondisi baik, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan semakin luas dan merata, terutama bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil, terdepan, dan sulit dijangkau. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan keamanan proses pembelajaran, mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik.

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai jumlah 595 sekolah antara lain SD sebanyak 312 sekolah, SMP 66 sekolah, PAUD 194 sekolah dan nonformal 23 sekolah sedangkan jumlah total ruang kelas sebanyak 3111 unit ruang kelas dari 595 sekolah. Sedangkan ruang kelas dalam kondisi baik dan sedang sebanyak 1.950 unit atau 1961 kondisi rusak atau dari target 77,78 % yang terealisasi sekitar 51,11 %. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat akan melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang difokuskan pada rehabilitasi ruang kelas rusak, pembangunan kembali ruang belajar yang sudah tidak layak, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya sesuai hasil pendataan dan skala prioritas. Pelaksanaan revitalisasi diharapkan mampu meningkatkan persentase cakupan sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik, sehingga seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan pada lingkungan belajar yang aman, layak, dan berkualitas.

3. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan

Persentase cakupan layanan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, yang tercermin antara lain melalui meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi minimal **B**. Akreditasi sekolah tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga mencerminkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kepemimpinan kepala sekolah, serta efektivitas tata kelola sekolah.

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai jumlah 595 sekolah antara lain SD sebanyak 312 sekolah, SMP 66 sekolah, PAUD 194 sekolah dan nonformal 23 sekolah dengan jumlah akreditasi A,B,C sebanyak 575 sekolah dan belum terakreditasi sebanyak 20 sekolah dengan target 71.76 % sedangkan realisasi capaian sebesar 42,36 % atau jumlah sekolah terakreditasi minimal B sebanyak 252 sekolah. Hal ini disebabkan masih adanya sekolah yang masih berakreditasi C dan ada beberapa sekolah yang belum terakreditasi.

4. Meningkatnya aksesibilitas layanan Kepemudaan

Pemerintah daerah secara bertahap melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap fasilitas kepemudaan, termasuk asrama siswa, agar tetap

memenuhi standar kelayakan fungsi dan memberikan manfaat yang optimal. Kegiatan tersebut meliputi perbaikan bangunan, pemeliharaan utilitas, penyediaan fasilitas pendukung, serta pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana secara berkala untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatannya. Meningkatnya persentase sarana dan prasarana kepemudaan yang berada dalam kondisi baik mencerminkan meningkatnya kualitas layanan pembinaan kepemudaan dan dukungan terhadap peserta didik yang memanfaatkan fasilitas asrama. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan program kepemudaan, memperluas akses layanan bagi generasi muda, serta mendukung pengembangan karakter, prestasi, dan daya saing pemuda secara berkelanjutan.

Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga tahun 2025 ada 2 asrama yang telah dilakukan perbaikan dan pembangunan pembangunan asrama putri Makassar dan pembangunan asrama puutra Makassar. embangunan asrama putra dan asrama putri diharapkan dapat meningkatkan akses layanan bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari daerah terpencil, kepulauan, maupun keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Ketersediaan asrama yang layak akan memberikan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga mahasiswa dapat lebih fokus dalam mengikuti proses pendidikan tanpa terbebani oleh kendala tempat tinggal. Selain mendukung keberlangsungan studi, keberadaan asrama juga diharapkan menjadi sarana pembinaan karakter, pengembangan kedisiplinan, kemandirian, serta memperkuat interaksi sosial antarmahasiswa. Dengan demikian, pembangunan asrama putra dan putri tidak hanya berfungsi sebagai penyedia hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan tinggi, serta mencetak generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

5. Meningkatnya kualitas dibidang kepemudaan

Peningkatan kualitas di bidang kepemudaan diwujudkan melalui bertambahnya jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing pemuda. Melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, para pemuda diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam mengembangkan usaha yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, Dinas Pendiidkan Pemuda dan Olahraga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek),

pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas bagi pemuda. Materi yang diberikan meliputi penyusunan rencana bisnis, pengelolaan keuangan usaha, pemasaran digital, pengemasan produk, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan usaha. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jiwa kewirausahaan, kreativitas, dan kemampuan pemuda dalam membaca peluang pasar.

Melalui peningkatan jumlah pemuda yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan kewirausahaan, diharapkan semakin banyak pemuda yang mampu memulai maupun mengembangkan usahanya secara mandiri. Kondisi tersebut akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya pemuda, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pengurangan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat menciptakan pemuda yang mandiri, produktif, inovatif, dan berdaya saing sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah.

Tahun 2025 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan kegiatan BIMTEK wirusaha pemuda sebanyak 50 orang dengan Target Kinerja 120 % atau capaian indikator masih 41,67 %.

6. Meningkatnya aksesibilitas dibidang olahraga

Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terus berupaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, serta penyediaan fasilitas olahraga sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Upaya tersebut bertujuan agar fasilitas olahraga berada dalam kondisi baik, aman, dan layak digunakan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maupun olahraga masyarakat.

Dengan meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan berfungsi dengan baik, akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga menjadi semakin luas dan merata. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat untuk berolahraga, mendukung pembinaan atlet secara berkesinambungan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi lahirnya atlet-atlet berprestasi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Selain itu, peningkatan akses terhadap fasilitas olahraga juga berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, produktif, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) daerah.

Dinas pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai target kinerja di tahun 2025 Persentase ketersediaan dan faslitas olahraga sesuai standar yaitu 66.67 % atau sebanyak 5 unit sarana olahraga dibangun dengan capaian realisasi sebanyak 7 unit atau 71,43 %.

7. Meningkatnya aksesibilitas dibidang olahraga

Pada tahun 2025 target prestasi olahraga pelajar sebesar 75% % dengan realisasi sebesar 33,33 % atau capaian kinerja sebesar 81.48 % yaitu jumlah atlet pelajar yang mendapatkan medali dalam event olahraga tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebanak 20 orang antara lain :

- a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2sn) Jenjang SD sebanyak 6 mendali dari cabor lomba karate putra (4 mendali)
- b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2sn) Jenjang SMP sebanyak 2 mendali dari pencat silat putra dan putri

C. `Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Jika dilihat Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dengan Tahun 2025 jika dirata ratakan mengalami kenaikan sekitar 3.07 %, namun jika dilihat dari 15 Indikator SPM antara tahun 2024 dengan 2025 ada beberapa yang mengalami penurunan . Berikut perbandingan capaian inidkator SPM untuk urusan pendidikan :

Tabel III.3
Perbandingan Capain Indikator SPM antara tahun 2024 dengan 2025

No	INDIKATOR SPM	JENJANG	REALISASI		KONDISI
			2024	2025	
1	Angka Partisipasi Sekolah 5 sd 6	PAUD	80.19	78.20	Turun
2	Proporsi guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	52.3	67.89	Naik
3	Proporsi jumlah stauan PAUD terakreditasi minimal B	PAUD	29.49	34.38	Turun
4	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 15	SD/SMP	95.47	95.90	Naik
5	Iklm Kebinekaan	SD	69.54	64.10	Turun
6	Iklm keamanan	SD	73.82	72.43	Turun
7	Iklm Inklusivitas	SD	57.57	57.48	Turun
8	Kemampuan Numerasi	SD	48.85	44.21	Turun
9	Kemampuan Literasi	SD	52.7	49.77	Turun
10	Iklm Kebinekaan	SMP	69.54	65.88	Turun
11	Iklm kemanan	SMP	69.26	67.8	Turun
12	Iklm Inklusivitas	SMP	54.46	57.07	Naik
13	Kemampuan Numerasi	SMP	54.86	57.50	Naik
14	Kemampuan Literasi	SMP	57.76	62.13	Naik
15	Angka Partisipasi Sekolah 7 sd 18	Kesetaraan	31.83	24.62	Turun
rata-rata			63.43	63.95	Naik

1. Pendidikan anak usia dini

Indikator kinerja pendidikan anak usia dini ada 3 yaitu :

- a. Angka partisipasi sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun
Angka partisipasi sekolah adalah jumlah anak yang bersekolah dijenjang pendidikan PAUD dengan jumlah penduduk usia 5 sd 6 tahun Pada tahun 2024 sebesar 80.19 % sedangkan tahun 2025 capaian indicator SPM sebesar 78.20 % atau turun 1.99 % hal ini disebabkan :
 - Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

- Keterbatasan akses dan ketersediaan satuan PAUD/TK di beberapa wilayah, sehingga tidak semua anak usia 5–6 tahun dapat terlayani
 - Sebagian orang tua memilih langsung memasukkan anak ke SD, tanpa melalui pendidikan PAUD atau TK terlebih dahulu
- b. Proporsi Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B
- Angka akreditasi sekolah dari tahun 2024 dengan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4.89 % pada tahun 2024 sebesar 29.49 % sedangkan tahun 2025 sebesar 34.38 % hal ini dipengaruhi oleh :
- Kesadaran pengelola lembaga PAUD yang semakin tinggi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui proses akreditasi.
 - Peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana, kurikulum, dan tenaga pendidik pada satuan PAUD
- c. Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4
- Kualifikasi pendidikan guru PAUD minimal S1/D4 pada tahun 2024 sebesar 52.30 % sedangkan tahun 2025 sebesar 67.89 % atau naik sebesar 15.59 % .hal ini dipengaruhi oleh:
- Meningkatnya kesadaran guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
 - Persyaratan kualifikasi minimal guru PAUD yang mendorong tenaga pendidik untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah

2. Pendidikan Dasar

- a. Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 15 tahun
- Capaian indikator APS usia t sd 15 tahun pada tahun tahun 2024 sebesar 95.47 % sedangkan pada tahun 2025 sebesar 95.90 % atau mengalami kenaikan sebesar 2.06 % hai ini dipengaruhi oleh :
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah
 - Sosialisasi wajib belajar pendidikan dasar yang terus dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah kepada masyarakat
 - Upaya pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah, melalui program penjangkauan dan pendampingan anak yang berisiko tidak melanjutkan sekolah
- b. Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP
- Kemampuan literasi SD pada tahun 2024 sebesar 52.70 % sedangkan tahun 2025 sebesar 49.77 % atau mengalami penurunan sebesar 2.93 % dari hal ini disebabkan :

- Minat baca siswa yang masih rendah, sehingga kemampuan memahami teks dan informasi belum berkembang secara optimal
- Metode pembelajaran literasi yang belum optimal, sehingga siswa kurang terbiasa dengan kegiatan membaca pemahaman dan analisis teks
- Kurangnya pembiasaan kegiatan literasi di lingkungan sekolah dan rumah, seperti kegiatan membaca rutin atau program literasi sekolah

Sedangkan Kemampuan literasi SMP pada tahun 2024 dengan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 10.17 % dari 57.76 % tahun 2024 menjadi 62.13 % di tahun 2025. Adapaun faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Meningkatnya penerapan program literasi di sekolah, seperti kegiatan membaca sebelum pembelajaran dan penguatan budaya literasi
- Pemanfaatan perpustakaan dan sumber belajar yang lebih optimal oleh peserta didik dan guru

c. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP

Capaian indikator skor kemampuan numerasi SD pada tahun 2024 sebesar sebesar 48.85 % sedangkan pada tahun 2025 sebesar 44.21 % atau turun 4.64 %. Hal ini disebabkan :

- Pemahaman konsep dasar matematika siswa yang masih rendah, terutama pada operasi hitung dan pemecahan masalah
- Metode pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan rumus, sehingga kemampuan penalaran numerasi siswa belum berkembang secara optimal

Sedangkan skor kemampuan numerasi SMP pada tahun 2024 sebesar 54.86 % dan tahun 2025 sebesar 57.50 % atau naik 5.49 % hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kompetensi guru dalam mengajarkan numerasi, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan profesional.
- Pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar yang lebih variatif, sehingga membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik.

d. Skor Kemampuan Kebinekaan SD dan SMP

Skor kemampuan kebinekaan SD tahun 2024 sebesar 69.54 % dan pada tahun 2025 sebesar 64.10 % atau turun 5.44 % sedangkan Skor Kemampuan Kebinekaan SMP pada tahun 2024 sebesar 67.51 % dan tahun 2025 65.88 % atau turun 1.63 %. Hal ini disebabkan :

- sikap saling menghargai perbedaan Kegiatan penguatan karakter dan moderasi dalam keberagaman belum dilaksanakan secara maksimal dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sekolah

- Pembelajaran yang berkaitan dengan nilai kebinekaan masih bersifat teoritis, sehingga siswa kurang memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Keterbatasan kegiatan ekstrakurikuler atau program sekolah yang mendukung penguatan

e. Iklim Inklusivitas SD dan SMP

Capaian indikator Iklim Inklusivitas SD pada tahun 2024 sebesar 54.46 % dan 2025 sebesar 57.48 % atau naik sebesar 3.02 sedangkan indikator Iklim Inklusivitas SMP pada tahun 2024 sebesar 54.46 % dan tahun 2025 sebesar 57.07 % atau naik 2.61 % hal ini dipengaruhi oleh :

- Meningkatnya kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan
- Adanya pembinaan dan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak dan pendidikan inklusif kepada guru dan tenaga kependidikan

f. Skor Kemampuan Keamanan SD dan SMP

Capaian indikator untuk Keamanan SD pada tahun 2024 sebesar 73.82% sedangkan tahun 2025 sebesar 72.43 % atau turun 1.39 % sedangkan Skor kemampuan Keamanan SMP pada tahun 2024 sebesar 69.26 % dan tahun 2025 sebesar 67.80 % atau turun 1.46 % Hal ini disebabkan :

- Kurangnya pemahaman siswa mengenai risiko dan cara menjaga keselamatan diri, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah
- Belum optimalnya penerapan program sekolah aman dan ramah anak, yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan di sekolah, seperti fasilitas keselamatan dan sistem pengawasan.

3. Kesenjangan

Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun capaian realisasi tahun 2024 sebesar 31.83 % sedangkan pada tahun 2025 sebesar 24.62 % atau mengalami penurunan sebesar 7.21 % hal ini disebabkan oleh :

- Kondisi ekonomi keluarga, yang menyebabkan sebagian anak memilih bekerja atau membantu orang tua dibandingkan melanjutkan pendidikan
- Masih adanya anak putus sekolah, terutama pada jenjang pendidikan menengah
- Faktor sosial dan lingkungan, seperti pernikahan usia dini atau pengaruh lingkungan yang kurang mendukung keberlanjutan pendidikan

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Indikator Pelayanan Standar Minimal (SPM)

1. Pendidikan Anak Usia Dini

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 sd 6 tahun

Dengan target 83.16 % dengan capaian realisasi sebesar 78.20 % adapun masalah yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan Akses di Pedesaan: Di daerah pedesaan, angka partisipasi PAUD cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti jarak tempuh yang jauh, kurangnya fasilitas transportasi, dan keterbatasan informasi tentang pentingnya pendidikan usia dini
- Kurangnya Kesadaran Orang Tua: Banyak orang tua yang kurang memahami manfaat pendidikan usia dini bagi perkembangan anak. Hal ini menyebabkan partisipasi anak-anak dalam PAUD menjadi rendah
- Kualitas Layanan yang Tidak Merata: Kualitas layanan PAUD tidak merata di seluruh Indonesia. Ada daerah yang memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas tinggi, sedangkan ada juga daerah yang masih memerlukan peningkatan kualitas layanan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas pendukung dapat menghambat peningkatan angka partisipasi PAUD

Adapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya PAUD melalui kampanye, seminar, dan media sosial.
- Pelatihan Guru: Memberikan pelatihan kepada guru PAUD agar mereka lebih kompeten dan kreatif dalam mengajar
- Subsidi Pendidikan: Memberikan bantuan biaya atau subsidi pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
- Fasilitas dan Infrastruktur: Meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur PAUD agar lebih menarik dan nyaman bagi anak-anak
- Kerjasama dengan Lembaga: Melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam program-program yang mendukung PAUD

b. Jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B

Jumlah satuan pendidikan PAUD yang telah terakreditasi minimal B dengan target 49.64 % dengan capaian 67.89 %. Masih ada beberapa yang

menjadi tantangan dan hambatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi bahan evaluasi seperti :

- Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan terlatih masih menjadi tantangan. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan diperlukan
- Kualitas Pengelolaan Satuan PAUD: Pengelolaan satuan PAUD yang kurang efisien dan kurang terstruktur dapat menghambat pencapaian akreditasi yang diinginkan. Peningkatan manajemen dan administrasi yang baik sangat diperlukan
- Akses dan Pemerataan Layanan: Pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD masih menjadi masalah di beberapa daerah. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai perlu diperhatikan
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya finansial dan material juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas PAUD. Diperlukan dukungan finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan mutu.

Adapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Melakukan pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- Peningkatan Proses Pembelajaran: Menggunakan metode pengajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan PAUD.
- Pengelolaan yang Efisien: Meningkatkan manajemen dan administrasi satuan PAUD agar lebih terstruktur dan efisien
- Dukungan Sumber Daya: Memastikan dukungan finansial yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan peningkatan mutu di satuan PAUD
- Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi diri internal secara berkala dan memonitor kinerja satuan PAUD untuk memastikan kualitas layanan yang terus meningkat

c. Proporsi jumlah guru PAUD kualifikasi S1/D4

Jumlah pendidik PAUD dengan kualifikasi Pendidikan D4/S1 target pada tahun 2025 sebesar 61.78 % dengan capaian 67.89 % walaupun capaian meningkat dari tahun sebelumnya tetap menjadi tantangan dan hambatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi bahan evaluasi seperti :

- Ketersediaan Calon Guru: Kurangnya jumlah lulusan S1 atau D4 yang memilih karir sebagai guru PAUD menjadi hambatan utama. Banyak calon guru yang lebih memilih karir di luar bidang Pendidikan

- **Kompensasi dan Karir:** Kompensasi yang diterima oleh guru PAUD sering kali lebih rendah dibandingkan dengan profesi lain, sehingga menurunkan daya tarik calon baru. Peningkatan kompensasi dan peluang karir yang lebih baik dapat menjadi Solusi
- **Pengembangan Profesional:** Guru PAUD memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Program pelatihan dan pengembangan yang efektif perlu diterapkan secara terus-menerus.
- **Perubahan Sosial dan Teknologi:** Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat juga menjadi tantangan dalam menghasilkan guru PAUD yang mampu menghadapi dinamika zaman.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan usia dari 7 sd 15 tahun anatar lain jenjang pendidikan dasar usia 7 sd 12 tahun dan jenjangn pendidikan SMP usia 13 sd 15 tahun

a. Angka partisiapsi sekolah usia 7 sd 15 tahun adalah target tahun 2025 sebesar 96.15 % dengan capaian indiaktor sebesar 95.90 %. Hal ini disebabkan antara lain :

- **Akses ke Pendidikan:** Di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil atau terpinggirkan, akses ke sekolah masih menjadi masalah. Anak-anak mungkin harus menempuh jarak yang jauh atau menghadapi kendala transportasi
- **Kualitas Guru:** Ketersediaan guru yang kompeten dan berkualitas masih menjadi tantangan. Banyak guru yang belum memiliki kualifikasi atau pelatihan yang memadai untuk mengajar sesuai standar yang diharapkan
- **Sarana dan Prasarana:** Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, seperti ruang kelas yang kurang, fasilitas sanitasi yang buruk, dan keterbatasan alat pembelajaran, dapat menghambat proses belajar mengajar
- **Kurangnya Dukungan Keluarga:** Dukungan dari keluarga sangat penting dalam pendidikan anak. Namun, beberapa keluarga mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan anak-anak mereka karena berbagai alasan, seperti kesibukan kerja atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pendidikan
- **Perubahan Teknologi dan Sosial:** Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi pendidikan, seperti adaptasi terhadap metode pembelajaran digital. Selain itu, perubahan sosial juga memengaruhi lingkungan belajar anak.

- Kesehatan dan Gizi: Kondisi kesehatan dan gizi anak-anak juga memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dengan baik. Masalah kesehatan atau kekurangan gizi dapat menghambat perkembangan kognitif dan fisik anak

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Peningkatan Akses ke Pendidikan berupa
Pembangunan Infrastruktur: Membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi yang memadai bagi siswa
- Peningkatan Kualitas Guru berupa Pelatihan dan Pengembangan Profesional seperti Mengadakan pelatihan berkala bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Rekrutmen Guru Berkualitas Menarik lulusan berkualitas untuk menjadi guru dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif.
- Dukungan Keluarga berupa Menyediakan program yang mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan dan cara mendukung anak-anak mereka dan mendorong komunikasi yang aktif antara sekolah dan keluarga untuk mendukung perkembangan anak
- Pemanfaatan Teknologi berupa Pembelajaran Daring: Menerapkan sistem pembelajaran daring untuk melengkapi pembelajaran tatap muka dan Aplikasi Pembelajaran: Menggunakan aplikasi dan platform pembelajaran digital untuk meningkatkan interaksi dan akses informasi.

b. Skor Kemampuan Literasi SD dan SMP

1. Kemampuan literasi SD secara umum dengan target sebesar 55.20 % dengan capaian realisasi 49.77 %
2. Kemampuan literasi SMP secara umum dengan target sebesar 58.86 % dengan capaian realisasi 62.13 %.

Kemampuan literasi SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten yang hanya sekitar 49.52 % dari target 60.48 % adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Akses Terhadap Buku dan Bahan Bacaan
Kurangnya Perpustakaan seperti Banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan atau koleksi buku yang memadai dan Harga Buku: Harga buku yang tinggi sering kali menjadi kendala bagi keluarga untuk membeli bahan bacaan tambahan.
- Kualitas Pengajaran
Metode Pengajaran yang kurang menarik dan monoton dapat membuat siswa kurang tertarik untuk belajar membaca dan menulis dan

Keterampilan Guru: Tidak semua guru memiliki keterampilan yang memadai dalam mengajar literasi, terutama di daerah-daerah terpencil

- Motivasi Siswa

Kurangnya Minat Baca: Beberapa siswa memiliki minat baca yang rendah, yang bisa disebabkan oleh kurangnya paparan terhadap kegiatan membaca sejak dini dan Kondisi Sosial-Ekonomi: Siswa dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah mungkin kurang mendapatkan dukungan untuk mengembangkan keterampilan literasi.

- Lingkungan Belajar

Kondisi Kelas: Ruang kelas yang kurang kondusif, seperti terlalu ramai atau tidak nyaman, dapat mengganggu konsentrasi siswa dan Teknologi: Meskipun teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif, penggunaan yang tidak tepat atau kurangnya akses terhadap teknologi juga bisa menjadi hambatan.

- Pengaruh Sosial dan Budaya:

Budaya Membaca: Kurangnya budaya membaca di lingkungan sosial siswa dapat mempengaruhi minat dan kemampuan literasi mereka

Adapun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Meningkatkan Akses Terhadap Buku

Membangun dan memperbaiki perpustakaan sekolah

- Peningkatan Kualitas Pengajaran

Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran literasi yang menarik dan efektif dan Menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual

- Meningkatkan motivasi siswa

Mengadakan kegiatan yang mendorong minat baca, seperti lomba membaca atau klub literasi

- Memberikan pelatihan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran literasi yang menarik dan efektif

- Memberikan dukungan dan motivasi dari orang tua dan komunitas.

Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif

- Menyediakan ruang kelas yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran

- Memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung literasi

- Membangun Budaya Membaca

Mendorong budaya membaca di lingkungan sekolah dan Masyarakat

Menyediakan akses terhadap bahan bacaan dalam bahasa ibu dan bahasa pengantar.

c. Skor Kemampuan Numerasi SD dan SMP

a. Kemampuan numerasi SD secara umum dengan target sebesar 51.75

% dengan capaian realisasi 44.21 %

- b. Kemampuan numerasi SMP secara umum dengan target sebesar 56.36 % dengan capaian realisasi 57.50 %.

Kemampuan numerasi SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Materi yang tidak aplikatif untuk kehidupan sehari-hari
- Kurangnya minat siswa terhadap matematika
- Kurangnya latihan soal berbasis numerasi
- Kurangnya pemahaman guru tentang konsep numerasi

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Meningkatkan akses siswa terhadap bahan bacaan yang berkualitas
- Menegembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kehidupan sehari hari
- Memeberikan pelatihan yang berkelanjutan dengan guru
- Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran matematika
- Meningkatkan dukungan orang tua dalam pemebelajaran numerasi
- Melakukan program bimbingan

d. Skor Iklim Inklusivitas SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Inklusivitas berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim Inklusivitas SD secara umum dengan target sebesar 60.07 % dengan capaian realisasi 57.48 %
2. skor Iklim Inklusivitas SMP secara umum dengan target sebesar 56.86 dengan capaian relaisasi 57.07 %.

Kemampuan Inklusivitas SD dan SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
- Keterbatasan Fasilitas: Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus
- Stigma dan Diskriminasi: Siswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, baik dari teman sekelas maupun dari staf sekolah.
- Keterbatasan Kurikulum: Kurikulum yang ada seringkali tidak fleksibel atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga sulit untuk mencapai inklusivitas penuh

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Pelatihan Guru

Pelatihan Berkelanjutan: Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat mengelola kelas yang inklusif dan memahami berbagai kebutuhan siswa.

Teknik Mengajar Inklusif: Mengajarkan teknik-teknik mengajar inklusif yang memungkinkan semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

- Fasilitas dan Akomodasi

Infrastruktur yang Ramah: Membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah agar lebih ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus

Teknologi Pendukung: Menggunakan teknologi yang dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar lebih efektif, seperti perangkat lunak bantu atau alat pembelajaran digital.

- Kesadaran dan Pendidikan Karakter

Program Kesadaran: Mengadakan program kesadaran dan pelatihan tentang pentingnya inklusivitas bagi siswa, guru, dan orang tua

Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk membangun sikap saling menghargai, empati, dan toleransi di antara siswa.

e. Iklim Keamanan SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Keamanan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

1. skor Iklim keamanan SD secara umum dengan target sebesar 74.72 % dengan capaian realisasi 72.43 %
2. skor Iklim keamanan SMP secara umum dengan target sebesar 69.01 % dengan capaian relaisasi 67.80 %

Kemampuan kemanan SMP masih dikategorikan rendah jika dilihat dari target nasional untuk kabupaten adapaun yang menjadi hambatan dan tantangan antara lain :

- Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan

Guru dan staf mungkin kurang memahami pentingnya keamanan sekolah atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat.

- Infrastruktur yang Tidak Memadai

Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas fisik yang mendukung keamanan, seperti pagar, CCTV, atau sistem alarm.

- Kejadian Bullying dan Kekerasan

Kekerasan dan perundungan (bullying) dapat mengancam keamanan siswa dan menciptakan lingkungan yang tidak nyaman.

- Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan Mental

Siswa yang mengalami masalah emosional atau mental mungkin tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan mental.

Adapaun solusi yang akan dilaksanakan berupa :

- Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru

Pelatihan Berkala: Mengadakan pelatihan berkala bagi guru untuk meningkatkan pemahaman tentang inklusivitas dan strategi pengajaran yang inklusif

Pengembangan Modul Inklusif: Mengembangkan modul pelatihan yang mencakup teknik mengelola kelas yang beragam dan menangani kebutuhan khusus siswa

- Fasilitas dan Teknologi

Infrastruktur Ramah Disabilitas: Membangun fasilitas fisik yang ramah disabilitas, seperti ramp dan lift, serta toilet yang aksesibel.

Alat Bantu Pembelajaran: Menggunakan teknologi dan alat bantu pembelajaran seperti perangkat lunak pembaca layar untuk siswa dengan keterbatasan penglihatan

- Kebijakan Sekolah

Kebijakan Anti-Diskriminasi: Mengembangkan dan menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan tegas, serta mekanisme pelaporan yang aman

Penerimaan Terbuka: Memastikan proses penerimaan siswa terbuka untuk semua, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus

- Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas

Program Kemitraan: Membentuk kemitraan dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung inklusivitas, seperti mengadakan pertemuan rutin dan program kolaboratif

Edukasi Orang Tua: Memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya inklusivitas dan cara mendukung anak-anak mereka di rumah.

- Pendidikan Karakter dan Kesadaran Sosial

Program Pendidikan Karakter: Mengintegrasikan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam program pendidikan karakter.

Kegiatan Kesadaran Sosial: Mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran sosial, seperti proyek layanan masyarakat atau diskusi kelas tentang inklusivitas.

- Dukungan Psikososial

Layanan Konseling: Menyediakan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan dukungan emosional dan psikologis

Pendampingan Khusus: Menyediakan pendamping atau asisten khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk membantu mereka dalam proses belajar

f. Iklim Kebinekaan SD dan SMP

Kontribusi skor Iklim Kebinekaan berdasarkan data rapor pendidikan antara lain :

a. skor Iklim Kebinekaan SD secara umum dengan target sebesar 70.54 % dengan capaian realisasi 64.10 %

b. skor Iklim Kebinekaan SMP secara umum dengan target sebesar 70.26 % dengan capaian relaisasi 65.88%

Walapaun target capaian tercapai namun tetpa menjadi bahan evaluasi kedepanya untuk mengatasi hambatan dan tantangan antara lain :

- Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu dapat menghambat terciptanya kebinekaan

- Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial di luar sekolah yang kurang mendukung nilai-nilai kebinekaan juga dapat mempengaruhi siswa

3. Kesenjangan usia 7 sd 18 tahun

Angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun kesetaraan dengan target 36.81 % dengan capaian 24.62 %. Ada beberapa factor yang mempengaruhi masih rendahnya APS kesetaraan in antara alian :

- Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Minimnya Pendidikan Kesenjangan: Banyak individu yang kurang mendapatkan pendidikan mengenai pentingnya kesetaraan gender, etnis, agama, dan lain-lain

Stereotip dan Prasangka: Adanya stereotip dan prasangka yang diwariskan dari generasi ke generasi bisa menjadi penghalang bagi partisipasi yang setara

- Budaya dan Norma Sosial

Norma Tradisional: Norma tradisional dan budaya patriarki masih kuat di beberapa masyarakat, membatasi peran dan partisipasi kelompok tertentu

Tekanan Sosial: Tekanan sosial untuk mematuhi norma-norma yang ada dapat menghambat individu untuk berpartisipasi secara setara

- Hambatan Ekonomi

Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali menghambat partisipasi kesetaraan, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung

Beban Kerja Ganda: Beban kerja ganda, terutama pada wanita yang harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, dapat menghambat partisipasi mereka

- Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang Tidak Merata: Ketidakmerataan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat partisipasi kesetaraan

Kurangnya Pelatihan dan Kesempatan: Kurangnya pelatihan dan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan

- Kurangnya Peran Model:

Ketidakhadiran Role Model yaitu Kurangnya figur atau role model yang berhasil dalam mencapai kesetaraan dapat mengurangi motivasi individu untuk berpartisipasi

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

1. Program Pengelolaan pendidikan

Program pengelolaan pendidikan merupakan program wajib yang mendukung SPM sesuai dengan Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan pelayanan minimal pelayanan dasar antara lain :

a. Pendidikan anak usia dini usia 5 sd 6 tahun

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai 17 (tujuh belas) sub kegiatan mendukung angka partisipasi sekolah PAUD baik penyediaan akses layanan berupa sarana dan prasarana Pendidikan seperti Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang, Pengadaan Alat Permainan Edukatif dan pembangunan pagar sekolah sedangkan Kegiatan peningkatan mutu pendidikan bagi para tenaga pendidik berupa Pengelolaan dana BOP PAUD untuk mendukung operasional sekolah , Peningkatan Mutu Pendidikan dalam peningkatan SDM tenaga pendidik seperti BIMTEK Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan sosialisasi Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

terkait tata Kelola sekolah serta pemenuhan akreditasi sekolah dalam pemenuhan SPM Kualifikasi Pendidikan minimal D4/S1 dan Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B.

Adapun capaian kinerja yang belum tercapai adalah Angka partisipasi sekolah usai 5 sampai dengan 6 tahun baru mencapai 78.20 % sehingga menjadi bahan evaluasi kedepannya.

b. Pendidikan Dasar

Dalam mendukung angka partisipasi sekolah usia 7 sd 12 tahun berupa : Ketersediaan sarana dan parasarana sekolah sasar baik berupa pembangunan ruang guru sebanyak 11 unit, unit Kesehatan sekolah sebanyak 12 unit, perpustakaan sekolah sebanyak 2 unit, utilitas sekolah sebanyak 18 unit , rehab sedang/berat ruang kelas sebanyak 29 unit, rehab perpustakaan sebanyak 2 unit, pengadaan mebel sekolah sebanyak 252 paket, pengadaan alat praktek sebanyak 36 paket dan Pembangunan laboratorium sebanyak 13 unit sedangkan dalam mendukung kemampuan literasi,numerasi,kebinekaan dan iklim kemandirian berupa kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, BIMTEK Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

c. Pendidikan sekolah menengah pertama

Dalam mendukung angka partisipasi sekolah usia 13 sd 15 tahun berupa Ketersediaan sarana dan parasarana sekolah berupa Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU sebanyak 5 unit, Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 8 unit, Perpustakaan Sekolah 2 unit, Pembangunan Laboratorium sebanyak 10 unit, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 3 unit, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 5 unit, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 3 unit, Pengadaan Mebel Sekolah pengadaan mebel 13 paket dan Alat Praktikum dan Peraga Siswa 10 unit sedangkan dalam mendukung kemampuan literasi,numerasi,kebinekaan dan iklim kemandirian berupa kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, BIMTEK Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

d. Kesetaraan

Dalam mendukung angka partisipasi sekolah usia 7 sd 18 tahun berupa kegiatan Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan dalam pemenuhan serta peningkatan SDM para tenaga pendidik.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Dalam mendukung Tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha dan berorganisasi Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga mempunyai program dan kegiatan berupa :

Ketersediaan sarana dan parasarana olahraga baik itu penyediaan asrama, pengadaan lapangan sepak bola dikecamatan serta fasilitas kegiatan pekan olahraga daerah dan pelatihan dan pengembangan kepemudaan berupa seleksi paskibraka dan sosialisasi penyalagunaan narkoba

III. II Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Pemerintah Daerah (DPPA-OPD) Tahun 2025 dengan total alokasi Anggaran Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebesar Rp 423.653.993.971,- yang terealisasi sebesar Rp. 415.476.067.288,- atau sebesar 98.07 % dengan sisa anggaran Rp. 8.177.926.683,- atau 1.93 %.

Sisa anggaran berasal dari sebagian besar sisa belanja pegawai sekitar, sisa tender dan beberapa pengadaan fisik tidak terealisasi serta sisa anggaran dana BOSP. Berikut rincian :

1. Belanja Pegawai Rp. 3.111.998.248,-,
2. Pengadaan fisik tidak teralisasi sebesar Rp. 778.960.000,-,
3. Belanja dana BOSP Rp. 1.272.259.237,-
4. Sisa Tender Rp. 3.014.709.198,-

Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 99.36 %. Realisasi fisik tidak 100 % disebabkan ada kegiatan pengadaan fisik tidak berjalan antara lain :

1. Rehabilitasi ruang kelas 1 Paket
2. Rehabilitasi GOR Manakarra 1 Paket

Hal ini disebabkan Gagal tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis sehingga menjadi bahan evaluasi yaitu Reviu Bersama Pokja Lakukan reviu penyebab gagal tender dengan Pokja Pemilihan, khususnya mengevaluasi kesesuaian dokumen.

Berikut uraian program kegiatan Dinas pendidikan pemuda dan olahraga :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator kinerja capaian sebesar 100% dengan pagu anggaran Rp. 309.553.065.930,- realisasi keuangan Rp. 306.406.262.094,- atau 98.98 % atau sisa anggaran sebesar 3.146.803.836,- atau 1.01 %. Sisa anggaran ini paling besar berkontribusi di sisa belanja ASN/PPPK dan sebagian kecil kegiatan belanja rutin seperti sisa pembayaran belanja pemeliharaan/pembayaran pajak kendaraan dan efisiensi penggunaan daya

listrik yang telah terbayarkan dalam 1 tahun. Berikut uraian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan yang dilaksanakan dalam 1 tahun baik dalam penyusunan laporan capaian mapupaun dokumen penuyusunan anggaran seperti RKA/DPA Pokok dan Perubahan dengan pagu anggaran Rp. 84.658.700,- dengan realisasi Rp. 84.658.700,- atau 100 % dan fisik 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini jumlah ASN/PPPK yang mendapatkan gaji dan tunjangan dengan jumlah 1.892 orang baik guru,pegawai administrasi dan guru PPPK dengan pagu anggaran Rp. 273.694.565.668,- dengan realisasi anggaran Rp. 269.294.922.895,- atau 98.39 % relisasi fisik 100 %.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen barang milik daerah atau inventarisasi aset baik bangunan kantor atau sekolah baik PAUD,SD dan SMP yang tersebar diseluruh kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp. 29.995.500,- atau 99.99 % dan fisik 100%

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen kepegawaian dan guru/pppk dengan pagu anggaran Rp. 52.005.600,- dan realisasi anggaran Rp. 51.965.600,- atau 99.92 % dengan realisasi fisik 100% dan fisik 100%

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan bahan logistik seperti makan minum pegawai dan tamu, belanja cetak dan penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 352.337.000,- dengan capaian realisasi Rp. 351.672.235,- atau 97.23 % dan fisik 66.66 % disebabkan ada 1 kegiatan tidak dilaksanakan yaitu belanj barang cetak dan pengandaan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berupa pembayaran jasa layanan perkantoran berupa pembayaran Listrik dan jasa internet dalam satu tahun dengan anggaran sebesar Rp. 153.053.240,- dengan capaian realisasi Rp. 133.790.253,- atau 97.23 % dan fisik 100 % dengan efisiensi/penghemtan penggunaan listrik sebesar Rp. 19.262.987,-

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan kendaraan dinas baik kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 25 Unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.000.000,- atau 78.09 % dengan efisiensi/penghematan penggunaan BBM sebesar Rp. 7.905.000,-

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan merupakan program wajib yang mendukung SPM pelayanan dasar antara lain :

- a. Pendidikan anak usia dini usia 5 sd 6 tahun
- b. Pendidikan Dasar usia 7 sd 15 tahun (Sekolah dasar dan Sekolah menengah pertama)
- c. Kesetaraan usia 7 sd 18 tahun

Program pengelolaan pendidikan dengan pagu anggaran Rp. 103.518.161.086,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 99.0680035.089,- atau 95.70% fisik 99.96 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.450.125.997,- atau 4.30 % % berikut rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dalam mendukung SPM mulai dari akses layanan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, angka partisipasi sekolah SD, Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan melalui kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan yang mendukung angka partisipasi sekolah yaitu jumlah kebutuhan dan layanan dalam pendidikan berupa penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.588.590.204,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.271.592.447,- atau 96.36 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.316.997.757,- atau 3.64 % sedangkan realisasi fisik 99.84 % hal ini disebabkan ada 1 kegiatan tidak teralisasi yaitu rehabilitasi ruang kelas 1 paket Gagal tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis yaitu 1 paket pengadaan rehabilitasi ruang kelas SD saluwito II. Berikut

Rincian Sub Kegiatan Peneglolaan Pendidikan sekolah dasar sebagai berikut :

a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran Rp. 2.869.369.253,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.752.911.382,- atau 95.94 % dan realisasi fisik 100%. Adapaun jumlah pengadaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU target sebanyak 18 ruang dan realisasi 18 ruang

b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pagu anggaran Rp. 606.084.571,- dengan realisasi anggaran Rp. 604.981.171,- atau 95.83 %. Adapun jumlah pengadaan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebanyak 4 ruang.

c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran Rp. 755.711.877,- - dengan capaian realisasi anggaran Rp. 724.221.592,- atau 99.82 %. Adapun jumlah pengadaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah sebanyak 4 unit.

d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran Rp. 12.156.166.888,- dengan capaian realisasi Rp. 11.943.595.616,- atau 98.25 %.Jumlah pengadaan Prasarana dan Utilitas Sekolah sebanyak 62 unit berupa pembagunan pagar,toilet dan penata halaman sekolah

e. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran Rp. 681.365.846,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 617.374.646,- atau 90.61 %

f. Pengadaan Mebel Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 283.0027.15,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 266.059.500,- atau 94.01 % dan fisik terealisasi 100 %. Jumlah pengadaan Mebel Sekolah sebanyak 4 paket

g. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 699.968.681,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 395.477.800,- atau 56.49 % dan fisik terealisasi 100 %. Jumlah bus sekolah dasar yang terpelihara sebanyak 6 unit.

h. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pagu anggaran sebesar Rp. 135.924.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 135.924.500,- atau 100 %. Kegiatan Lomba FLS2N sebanyak 176 Orang peserta yang mengikuti lomba.

i. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pagu anggaran sebesar Rp. 268.971.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 234.571.000,- atau 87.21 %. Kegiatan ini berupa Bimtek Revitalisasi Bahasa Daerah Sebagai mata Pelajaran Mulok di SD bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebanyak 73 Orang.

j. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 312.818.000,- atau 96.25 %. Kegiatan ini berupa Integrasi Pendidikan Kebencanaan melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Holistik sebanyak 312 Satuan Pendidikan

k. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sebesar Rp. 31.430.838.265,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 31.166.070.740,- atau 99.15 %. Sebanyak 311 sekolah yang mendapatkan dana operasional sekolah dasar.

l. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pagu anggaran sebesar Rp. 193.207.200,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 172.407.200,- atau 89.23 %. Kegiatan ini berupa monitoring dan evaluasi terkait penyusunan laporan keuangan dan penginputan aplikasi MARKAS dijenjang Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebanyak 377 sekolah.

m. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.736.266.447,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.569.587.508,- atau 90.40 %. Target Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar sebanyak 11 ruang.

n. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 91.867.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 87.067.500,- atau 94.78 %. Kegiatan ini Optimalisasi Teknologi sebagai Media Pembelajaran dalam Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

o. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 100.000.000,- atau 100 %. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Melalui Media Digital Tingkat Satuan Pendidikan dasar.

p. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 100000000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 96.800.000,- atau 96.80 %

q. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 82.402.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 72.784.000,- atau 88.33 %. Kegiatan ini berupa Workshop Pengembangan Media Pembelajaran Digital dengan Coding Jenjang SD

r. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 228.750.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 203.290.000,- atau 88.87 %. Kegiatan ini berupa Bimtek Pemanfaatan Komunitas Belajar (KOMBEL).

s. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 93.600.000,- atau 93.60 %. Kegiatan ini berupa Sosialisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Tingkat SD

t. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 101.457.000,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 87.605.000,- atau 86.34 %. Kegiatan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Dak)

u. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 443.693.500,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 425.293.500,- atau 95.85 % Kegiatan ini berupa Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Pelatihan Bimbingan Konseling Bagi Guru Kelas SD, Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pelatihan Proktor ANBK

v. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 131.798.400,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 131.798.400,- atau 100 % Kegiatan ini berupa Festival Tunas Bahasa Ibu

w. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 8.489.646.211,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 7.672.302.992,- atau 90.37 % dan fisik 96 % kegiatan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 25 paket dan teralisasi sebanyak 24 paket. Hal ini disebabkan gagal tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis yaitu 1 paket pengadaan rehabilitasi ruang kelas SD saluwito II

x. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.277.098.350,- dengan capaian realisasi anggaran Rp. 1.171.597.200,- atau 91.74 % dan fisik 100 % kegiatan pengadaan starlink, komputer dan UPS untuk mendukung kegiatan digitalisasi sebanyak 3 paket

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dalam mendukung SPM mulai dari Akses layanan sarana dan prasarana, angka partisipasi sekolah SMP, Kemampuan Literasi, Kemampuan Numerasi, Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan melalui kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan yang mendukung angka partisipasi sekolah SMP yaitu jumlah kebutuhan dan layanan dalam pendidikan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.130.728.610,- dengan capaian realisasi anggaran Rp.

23.886.862.466,- atau 80.51 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.958.407.675,- atau 95.05 %

a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.309.878.609,- dengan capaian sebesar Rp. 1.264.599.956,- atau 96.54 % dengan target sebanyak 6 unit ruang guru yang dibangun realisasi fisik 100 %

b. Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 54.800.000,- dengan capaian sebesar Rp. 52.586.000,- atau 95.95 % dengan target sebanyak 1 unit yang dibangun dengan realisasi fisik 100 %.

c. Pembangunan Laboratorium

Pagu anggaran sebesar Rp. 436.709.956,- dengan capaian sebesar Rp. 171.112.050,- atau 39.18 % dengan target sebanyak 1 unit laboratorium berserta kelengkapannya yang dibangun.

d. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 704.861.832,- dengan capaian sebesar Rp. 703.262.832,- atau 99.77 % dengan target sebanyak 6 unit.

e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.600.408.238,- dengan capaian sebesar Rp. 2.536.724.042,- atau 97.55 % dengan target sebanyak 19 unit realisasi fisik 100 %

f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.516.834.711,- dengan capaian sebesar Rp. 2.536.724.042,- atau 90.88 % dengan target sebanyak 11 ruang realisasi fisik 100 %

g. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 375.220.000,- dengan capaian sebesar Rp. 375.220.000,- atau 100 % dengan target sebanyak 5 unit dengan realisasi fisik 100 %

h. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 159.570.000,- dengan capaian sebesar Rp. 152.618.400,- atau 95.64 % dengan target sebanyak 3 unit bus sekolah yang terpelihara.

i. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pagu anggaran sebesar Rp. 139.045.500,- dengan capaian sebesar Rp. 139.045.500,- atau 100 % berupa kegiatan Seleksi FLS2N Jenjang SMP sebanyak 46 Peserta didik yang mengikuti.

j. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sebesar Rp. 175.245.000,- dengan capaian sebesar Rp. 167.245.000,- atau 95.43 % berupa kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik berupa Pelatihan Penguatan Numerasi Dalam Pembelajaran Bagi Guru Matematika Dan Ipa Jenjang Smp sebanyak 48 peserta.

k. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 % berupa kegiatan Kegiatan Penguatan Kapasitas Dewan Pendidikan

l. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.803.747.000,- dengan capaian sebesar Rp. 12.635.713.400,- atau 98.68 % berupa belanja operasional sekolah sebanyak 65 sekolah baik reguler maupun kinerja.

m. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan

Pagu Anggaran Sebesar Rp. 198.739.000,- Dengan Capaian Sebesar Rp. 191.539.000,- Atau 96.38 Berupa Kegiatan WORKSHOP PENGEMBANGAN DESAIN PEMBELAJARAN INOVATIF Sebanyak 65 Peserta.

n. Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 139.795.000,- dengan capaian sebesar Rp. 139.795.000,- atau 100 % berupa kegiatan FESTIVAL KARYA gtk sebanyak 1 konten digital.

o. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 178.401.500,- dengan capaian sebesar Rp. 176.801.500,- atau 99.10 % berupa kegiatan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana melalui Aplikasi DAPODIK Tingkat Satuan Pendidikan Menengah sebanyak 62 peserta

p. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 169.135.750,- dengan capaian sebesar Rp. 162.653.500,- atau 96.17 % berupa kegiatan Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Pendidikan (Sosialisasi Pemanfaatan Asesmen Nasional)

q. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 131.445.500,- dengan capaian sebesar Rp. 126.645.300,- atau 96.34 % berupa kegiatan bimtek dan pelatihan satuan pendidikan aman bencana tingkat

r. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk

pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Pagu anggaran sebesar Rp. 62.475.000,- dengan capaian sebesar Rp. 59.275.000,- atau 94.88 % berupa kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SP sebanyak 1 kegiatan.

s. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 120.2430.00,- dengan capaian sebesar Rp. 102.511.900,- atau 100 % berupa kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) dari 65 sekolah.

t. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.497.719.914,- dengan capaian sebesar Rp. 2.086.537.012,- atau 100 % berupa pembanguan ruang kelas baru sebanyak 8 ruang dengan realisasi fisik 100 %

u. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 243.908.100,- dengan capaian sebesar Rp. 230.148.000,- atau 95.05 % berupa Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan / Atau Magang/PKL Untuk Peningkatan Kapasitas Pelatihan Penyusunan Soal Berbasis Masalah (AKM) sebanyak 126 peserta

3. Pengelolaan Pendidikan usia dini (PAUD)

Dalam rangka mendukung angka partisipasi sekolah pendidikan usia dini baik angka partisipasi usia anak 5 sd 6 tahun, proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikais pendidikan D4/S1 dan Jumlah satuan PAUD yang terakreditasi. Berikut sub kegiatan yang mendukung anatar lain :

a. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.238.555.600,- dengan capaian sebesar Rp. 2.232.988.200,- atau 99.75 % berupa Pembangunan pagar sekolah dan toilet sekolah total 12 paket dengan realisasi 100 %.

b. Pengadaan Mebel PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 187.500.000,- dengan capaian sebesar Rp. 182.418.650,- atau 97.28 % berupa pengadaan mebel sekolah sebanyak 21 paket realisasi 100 %.

c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100 % berupa kegiatan Apresiasi Gebyar PAUD dan Tujuh Kebiasaan Anak Hebat sebanyak 175 peserta

d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100 % berupa kegiatan Kegiatan Sosialisasi Stunting dan KLA (Kota Layak Anak) total sekolah terlibat 193 sekolah.

e. Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 3.925.028.000,- dengan capaian sebesar Rp. 3.296.730.888,- atau 83.99 % berupa belanja operasional sekolah baik reguler maupun kinerja.

f. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 74.440.000,- atau 99.25 % berupa kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bop Paud tiap kecamatan terkait laporan BOP paud dan inputan aplikasi MARKAS.

g. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 150.000.000,- atau 100 % berupa Bimtek Pelatihan Operator Arkas BOP PAUD sebanyak 70 orang.

h. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan diBidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 43.042.122,- dengan capaian sebesar Rp. 43.042.122,- atau 100 % berupa Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan PAUD.

i. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 % berupa kegiatan Sosialisasi Pengelolaan kinerja Kepala Sekolah dan Guru PAUD.

j. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 39.000.000,- atau 100 % berupa kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Komunitas Belajar Bidang PAUD

k. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Pagu anggaran sebesar Rp. 434.210.250,- dengan capaian sebesar Rp. 432.869.100,- atau 99.69 % sebanyak 2 ruang kelas realisasi fisik 100 %.

l. Penyediaan infrastruktur TIK

Pagu anggaran sebesar Rp. 164.500.000,- dengan capaian sebesar Rp. 148.926.796,- atau 99.69 % sebanyak 8 paket pengadaan laptop dan printer untuk media pembelajaran sekolah realisasi fisik 100 %.

m. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100 % kegiatan berupa Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jenjang PAUD sebanyak 150 peserta.

- n. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi

Pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100% berupa kegiatan Bimtek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan PAUD sebanyak

- o. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

PAUD sebanyak 65 orang dari guru dan tenaga pendidik Pagu anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 145.000.000,- atau 100% berupa kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru dan Kepala Sekolah

- p. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.101.383.800,- dengan capaian sebesar Rp. 1.090.018.320,- atau 98.96 % berupa Alat Permainan Edukasi sebanyak 25 paket dengan realisasi fisik 100 %.

- q. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pagu anggaran sebesar Rp. 767.957.000,- dengan capaian sebesar Rp. 758.314.700,- atau 98.96 % berupa Alat Permainan Edukasi sebanyak 6 ruang dengan realisasi fisik 100 %.

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan mendukung SPM yaitu dari angka partisipasi sekolah melalui Nonformal/Kesetaraan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sebesar Rp. 3.992.4000.00,- dengan capaian sebesar Rp. 3.856.700.000,- atau 96.60 % berupa kegiatan sosialisasi penggunaan dana bop sebanyak 21 lembaga.

- b. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.486.528.000,- dengan capaian sebesar Rp. 4.275.367.000,- atau 95.29 % berupa kegiatan penegelolaan dana BOP ksestraan sebanyak 21 Lembaga

- c. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 137.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 137.000.000,- atau 100% berupa kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Rekonvirmasi Data Ats di 11 Kecamatan koordinasi penanganan ats.

d. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 143.008.000,- dengan capaian sebesar Rp. 143.008.000,- atau 100 % berupa kegiatan Sosialisasi Persiapan Anbk Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di 11 kecamatan.

e. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

f. Pagu anggaran sebesar Rp. 99.133.000,- dengan capaian sebesar Rp. 98.659.900,- atau 99.52 % berupa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik sebanyak 87 paket dengan relaisaisi fisik 100 %

g. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Pagu anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dengan capaian sebesar Rp. 169.916.000,- atau 99.95 % berupa kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem sebanyak 60 orang

h. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pagu anggaran sebesar Rp. 30.545.000,- dengan capaian sebesar Rp. 30.345.000,- atau 99.34 % berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan anbk pendidikan kesetaraan

3. Program pengembangan kurikulum

Dalam mendukung penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya Peningkatan kompetensi pendidik PAUD berupa Guru perlu diberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop tentang metode pembelajaran kreatif, bermain sambil belajar, serta pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak adapun sub kegiatan yang mendukung antara lain :

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yaitu Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini

Pagu anggaran sebesar Rp. 63.368.500,- dengan capaian realisasi Rp. 63.368.500,- atau 100 % berupa kegiatan in house training paud & dikmas dalam membentuk profil pelajar

4. Program pengendalian perizinan pendidikan

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang legal, terstandar, dan berkualitas. Melalui proses perizinan ini, setiap lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) dan satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh masyarakat diwajibkan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta standar penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat antara lain :

1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Pagu anggaran sebesar Rp. 66.553.400,- dengan capaian realisasi Rp. 65.341.000,- atau 98.18 % berupa jumlah dokumen yang diterbitkan dan kegiatan sosialisasi Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat keluaran kegiatan ini target 1 dokumen

5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Dalam mendukung peningkatan aksesibilitas layanan kepemudaan baik di sarana dan prasarana pemuda juga kualitas pemuda yang terfasilitasi dalam kewirausahaan pemuda di kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar Rp. 3.445.860.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.360.312.900,- atau 97.52 % antara lain :

Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota mempunyai sub kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
Pagu anggaran sebesar Rp. 47.939.000,- dengan capaian realisasi Rp. 47.939.000 atau 100 % berupa kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda dengan 50 peserta.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
Pagu anggaran sebesar Rp. 176.078.100,- dengan capaian realisasi Rp. 173.618.100 atau 98.60 % berupa kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda dengan 50 peserta
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

tingkat kabupaten/kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.918.3193.00,- dengan capaian realisasi Rp. 2.851.191.800 atau 97.70% berupa Pengadaan pembangunan asrama putri Makassar dan Pembagunan Pagar Asrama dengan realisasi fisik 100 %

6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Dalam peningkatan aksesibilitas layanan sarana dan prasarana olahraga yang memnuhi standar dan penyelenggaraan kompetisi olahraga dijenjang pendidikan Daerah Kabupaten/Kota untuk atlet berprestasi dengan pagu anggaran Rp. 7.006.984.655,- dengan capaian realisasi Rp. 6.512.747.705,- atau 92.94 % berupa kegiatan antara lain :

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 700.00.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.950.000,- atau 98.50 % kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

1. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan

Pagu anggaran sebesar Rp. 9.110.76.200,- dengan capaian realisasi Rp. 9.095.76.200 atau 99.83 % berupa :

- Penyelenggaraan Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN)
- Kegiatan Kejuaraan Futsal
- Kejuaraan Bola Basket
- Kejuaraan Bola Voli
- Kejuaraan Sepak Bola dan Tenis Lapangan
- Kejuaraan tenis lapangan u23
- Penyelenggaraan Kegiatan Kejuaraan Silat

b. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga melalui Bantuan Hibah kepada KONI merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi olahraga serta memperkuat tata kelola organisasi olahraga di daerah. Bantuan hibah yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan atlet, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga yang berorientasi pada peningkatan prestasi dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait

Pagu anggaran sebesar Rp. 410.000.000,- dengan capaian realisasi Rp. 410.000.000 atau 100 %

c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.685.908.455,- dengan capaian realisasi Rp. 5.193.171.505 atau 91.33 %

Tabel III.5
Tabel Capaian realisasi anggaran tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		PAGU	Indikator		REALISASI			Sisa Anggaran	
							Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
1.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA										
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	Persen	309,553,065,930	99.26	Persen	306,406,262,094	98.98	100	3,146,803,836	1.02
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	57,689,180	100	Persen	57,689,100	100	100	80	0.00
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	7,050,400	2	Dokumen	7,050,400	100	100	-	-
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8,170,000	1	Dokumen	8,170,000	100	100	-	-
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6,335,200	1	Dokumen	6,335,200	100	100	-	-
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	8,530,000	1	Dokumen	8,530,000	100	100	-	-
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	13,335,000	1	Dokumen	13,335,000	100	100	-	-
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	14,268,580	8	Laporan	14,268,500	100	100	80	0.00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	308,910,518,240	100	Persen	305,798,307,992	99	100	3,112,210,248	1.01
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2789	Orang	308,767,521,440	2789	Orang	305,655,523,192	98.99	100	3,111,998,248	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	133,870,000	1	Dokumen	133,870,000	100	100	-	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	9,126,800	1	Laporan	8,914,800	97.68	100	212,000	2.32
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	18,045,100	100	Persen	18,044,900	100	100	200	0.00
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	18,045,100	1	Laporan	18,044,900	100	100	200	0.00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	22,952,000	100	Persen	22,942,000	100	100	10,000	0.04
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	15,922,000	1	Dokumen	15,922,000	100	100	-	-
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Orang	7,030,000	1	Orang	7,020,000	100	100	10,000	0.14
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	127,532,500	94.12	Persen	123,997,495	97	100	3,535,005	2.77
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Paket	20,001,300	1	Paket	19,980,000	100	100	21,300	0.11
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	2,880,000	0	Paket	-	-	-	2,880,000	100.00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	104,651,200	15	Laporan	104,017,495	99.39	100	633,705	0.61
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	60,000,000	100	Persen	59,283,000	98.81	100	717,000	1.20
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Unit	60,000,000	3	Unit	59,283,000	98.81	100	717,000	1.20
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	295,476,240	100	Persen	273,049,937	92.41	100	22,426,303	7.59
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	142,053,240	1	Laporan	123,026,937	86.61	100	19,026,303	13.39
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	153,423,000	1	Laporan	150,023,000	97.78	100	3,400,000	2.22
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	60,852,670	100	Persen	52,947,670	87.01	100	7,905,000	12.99

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator	PAGU	Indikator	REALISASI			Sisa Anggaran	
					Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	60,852,670	25 Unit	52,947,670	87.01	100	7,905,000	12.99
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93.80 Persen	103,518,161,086	Persen	99,068,035,089	95.70	99.96	4,450,125,997	4.30
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.59 Persen	63,588,590,204	Persen	61,271,592,447	96.36	99.84	2,316,997,757	3.64
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	18 Ruang	2,869,369,253	18 Ruang	2,752,911,382	95.94	100	116,457,871	4.06
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	606,084,571	4 Ruang	604,981,171	99.82	100	1,103,400	0.18
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4 Ruang	755,711,877	4 Ruang	724,221,592	95.83	100	31,490,285	4.17
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	62 Unit	12,156,166,888	62 Unit	11,943,595,616	98.25	100	212,571,272	1.75
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5 Unit	681,365,846	5 Unit	617,374,646	90.61	100	63,991,200	9.39
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	4 Paket	283,002,715	4 Paket	266,059,500	94.01	100	16,943,215	5.99
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Unit	699,968,681	6 Unit	395,477,800	56.50	100	304,490,881	43.50
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	176 Orang	135,924,500	176 Orang	135,924,500	100.00	100	-	-
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	73 Orang	268,971,000	73 Orang	234,571,000	87.21	100	34,400,000	12.79
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	311 Satuan Pendidikan	325,000,000	311 Satuan Pendidikan	312,818,000	96.25	100	12,182,000	3.75
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311 Satuan Pendidikan	31,430,838,265	311 Satuan Pendidikan	31,166,070,740	99.16	100	264,767,525	0.84
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311 Satuan Pendidikan	193,207,200	311 Satuan Pendidikan	172,407,200	89.23	100	20,800,000	10.77
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	11 Ruang	1,736,266,447	11 Ruang	1,569,587,508	90.40	100	166,678,939	9.60
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55 Orang	91,867,500	55 Orang	87,067,500	94.78	100	4,800,000	5.22
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1 Konten Digital	100,000,000	1 Konten Digital	100,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	70 Orang	100,000,000	70 Orang	96,800,000	96.80	100	3,200,000	3.20
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	82,402,000	1 Dokumen	72,784,000	88.33	100	9,618,000	11.67
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	233,453,200	77.82	100	66,546,800	22.18
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Komunitas	228,750,000	1 Komunitas	203,290,000	88.87	100	25,460,000	11.13
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	93,600,000	93.60	100	6,400,000	6.40
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1522 Buku	101,457,000	1522 Buku	87,605,000	86.35	100	13,852,000	13.65
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	120 Orang	443,693,500	120 Orang	425,293,500	95.85	100	18,400,000	4.15

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		PAGU	Indikator		REALISASI			Sisa Anggaran	
							Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	311	Satuan Pendidikan	131,798,400	311	Satuan Pendidikan	131,798,400	100.00	100	-	-
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	25	Ruang	8,489,646,211	24	Ruang	7,672,302,992	90.37	96	817,343,219	9.63
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3	Paket	1,277,098,350	3	Paket	1,171,597,200	91.74	100	105,501,150	8.26
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.91	Persen	25,130,728,610	98.46	Persen	23,886,862,466	95.05	100	1,243,866,144	4.95
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6	Ruang	1,309,878,609	6	Ruang	1,264,599,956	96.54	100	45,278,653	3.46
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1	Paket	54,800,000	1	Paket	52,586,000	95.96	100	2,214,000	4.04
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	4	Ruang	436,709,956	4	Ruang	171,112,050	39.18	100	265,597,906	60.82
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6	Unit	704,861,832	6	Unit	703,262,832	99.77	100	1,599,000	0.23
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19	Unit	2,600,408,238	19	Unit	2,536,724,042	97.55	100	63,684,196	2.45
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11	Ruang	2,516,834,711	11	Ruang	2,287,352,974	90.88	100	229,481,737	9.12
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	Unit	375,220,000	5	Unit	375,220,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	Unit	159,570,000	3	Unit	152,618,400	95.64	100	6,951,600	4.36
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46	Orang	139,045,500	46	Orang	139,045,500	100.00	100	-	-
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	48	Orang	175,245,000	48	Orang	167,245,000	95.43	100	8,000,000	4.57
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	65	Satuan Pendidikan	50,000,000	65	Satuan Pendidikan	50,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	65	Satuan Pendidikan	12,803,747,000	65	Satuan Pendidikan	12,635,713,400	98.69	100	168,033,600	1.31
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			198,739,000			191,539,000	96.38	100	7,200,000	3.62
1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1	Konten Digital	139,795,000	1	Konten Digital	139,795,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	62	Orang	178,401,500	62	Orang	176,801,500	99.10	100	1,600,000	0.90
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	169,135,750	1	Dokumen	162,653,500	96.17	100	6,482,250	3.83
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	131,445,500	1	Dokumen	126,645,300	96.35	100	4,800,200	3.65
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Dokumen	62,545,000	1	Dokumen	57,745,000	92.33	100	4,800,000	7.67
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	62,475,000	1	Kegiatan	59,275,000	94.88	100	3,200,000	5.12
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	65	Satuan Pendidikan	120,243,000	65	Satuan Pendidikan	120,243,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8	Ruang	2,497,719,914	8	Ruang	2,086,537,012	83.54	100	411,182,902	16.46

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		PAGU	Indikator		REALISASI			Sisa Anggaran	
							Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	126	Orang	243,908,100	126	Orang	230,148,000	94.36	100	13,760,100	5.64
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	96.51	Persen	9,721,176,772	98.45	Persen	9,043,748,776	93.03	100	677,427,996	6.97
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	12	Unit	2,238,555,600	12	Unit	2,232,988,200	99.75	100	5,567,400	0.25
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	21	Paket	187,500,000	21	Paket	182,418,650	97.29	100	5,081,350	2.71
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	173	Orang	75,000,000	173	Orang	75,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	193	Satuan Pendidikan	150,000,000	193	Satuan Pendidikan	150,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	193	Satuan Pendidikan	3,925,028,000	193	Satuan Pendidikan	3,296,730,888	83.99	100	628,297,112	16.01
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	193	Satuan Pendidikan	75,000,000	193	Satuan Pendidikan	74,440,000	99.25	100	560,000	0.75
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	70	Orang	150,000,000	70	Orang	150,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	43,042,122	1	Dokumen	43,042,122	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Komunitas	39,000,000	1	Komunitas	39,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2	Ruang	434,210,250	2	Ruang	432,869,100	99.69	100	1,341,150	0.31
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	8	Paket	164,500,000	8	Paket	148,926,796	90.53	100	15,573,204	9.47
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	150	Peserta didik	75,000,000	150	Peserta didik	75,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	100,000,000	1	Kegiatan	100,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65	Orang	145,000,000	65	Orang	145,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	25	Paket	1,101,383,800	25	Paket	1,090,018,320	98.97	100	11,365,480	1.03
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6	Ruang	767,957,000			758,314,700	98.74	100	9,642,300	1.26
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.74	Persen	5,077,665,500	91.30	Persen	4,865,831,400	95.83	100	211,834,100	4.17
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21	Satuan Pendidikan	38,419,000	21	Satuan Pendidikan	38,419,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21	Satuan Pendidikan	4,486,528,000	21	Satuan Pendidikan	4,275,367,000	95.29	100	211,161,000	4.71
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	137,000,000	1	Dokumen	137,000,000	100.00	100	-	-
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	Dokumen	143,008,000	1	Dokumen	143,008,000	100.00	100	-	-

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		PAGU	Indikator		REALISASI			Sisa Anggaran	
							Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	87	Paket	99,133,000	87	Paket	98,659,900	99.52	100	473,100	0.48
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	80	Orang	143,032,500	80	Orang	143,032,500	100.00	100	-	-
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1	Kegiatan	30,545,000	1	Kegiatan	30,345,000	99.35	100	200,000	0.65
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100	Persen	63,368,500	100	Persen	63,368,500	100.00	100	-	-
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	Persen	63,368,500	100	Persen	63,368,500	100	100	-	-
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	Dokumen	63,368,500	1	Dokumen	63,368,500	100.00	100	-	-
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100	Persen	66,553,400	100	Persen	65,341,000	98.18	100	1,212,400	1.82
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	Persen	66,553,400	100	Persen	65,341,000	98.18	100	1,212,400	1.82
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	66,553,400	1	Dokumen	65,341,000	98.18	100	1,212,400	1.82
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	50	Persen	3,445,860,400	28.10	Persen	3,360,312,900	97.52	100	85,547,500	2.48
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	50	Persen	3,445,860,400	28.10	Persen	3,360,312,900	97.52	100	85,547,500	2.48
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	50	Orang	47,939,000	50	Orang	47,939,000	100.00	100	-	-
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1	Kegiatan	176,078,100	1	Kegiatan	173,618,100	98.60	100	2,460,000	1.40
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	130	Orang	303,524,000	130	Orang	287,564,000	94.74	100	15,960,000	5.26
2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2	Unit	2,918,319,300	2	Unit	2,851,191,800	97.70	100	67,127,500	2.30
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	83.33	Persen	7,006,984,655	40.74	Persen	6,512,747,705	92.95	96.30	494,236,950	7.05
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.33	Persen	911,076,200	40.74	Persen	909,576,200	100	100	1,500,000	0.16
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	570	Orang	911,076,200	570	Orang	909,576,200	99.84	100	1,500,000	0.16
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100	Persen	410,000,000	100	Persen	410,000,000	100	100	-	-
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1	Laporan	410,000,000	1	Laporan	410,000,000	100.00	100	-	-

Kode Rekening	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator		PAGU	Indikator		REALISASI			Sisa Anggaran	
							Anggaran	Keuangan	Fisik	Rp	%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	66.67	Persen	5,685,908,455	40	Persen	5,193,171,505	91.3	88.89	492,736,950	8.67
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	9	Unit	5,685,908,455	8	Unit	5,193,171,505	91.33	80	492,736,950	8.67
	JUMLAH			423,653,993,971.00			415,476,067,288.00	98.07	99.38	8,177,926,683.00	1.93

Tabel III.6
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI		Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
			Kinerja		Kinerja	Anggaran				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	309.553.065.930	99,26	Persen	306.406.262.094	3.146.803.836	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan sesuai jadwal dan standar teknis.	100	Persen	57.689.180	100	Persen	57.689.100	80	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	7.050.400	2	Dokumen	7.050.400	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.170.000	1	Dokumen	8.170.000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	6.335.200	1	Dokumen	6.335.200	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.530.000	1	Dokumen	8.530.000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	13.335.000	1	Dokumen	13.335.000	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	14.268.580	8	Laporan	14.268.500	80	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen keuangan perangkat daerah (SPJ, laporan realisasi anggaran, BKU, dan lainnya) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	Persen	308.910.518.240	100	Persen	305.798.307.992	3.112.210.248	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2789	Orang	308.767.521.440	2789	Orang	305.655.523.192	3.111.998.248	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	133.870.000	1	Dokumen	133.870.000	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	9.126.800	1	Laporan	8.914.800	212.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pencatatan barang milik daerah yang lengkap dan akurat dalam sistem administrasi.	100	Persen	18.045.100	100	Persen	18.044.900	200		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	18.045.100	1	Laporan	18.044.900	200		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data kepegawaian dalam sistem informasi kepegawaian	100	Persen	22.952.000	100	Persen	22.942.000	10.000		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	15.922.000	1	Dokumen	15.922.000	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	7.030.000	1	Orang	7.020.000	10.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang melaksanakan administrasi umum sesuai prosedur	100	Persen	127.532.500	94,12	Persen	123.997.495	3.535.005		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.001.300	1	Paket	19.980.000	21.300		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.880.000	0	Paket	-	2.880.000	Tidak dilaksanakan karena telah terakomodir di kegiatan lain	Melakukan analisis berdasarkan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	Laporan	104.651.200	15	Laporan	104.017.495	633.705		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan perencanaan kebutuhan dan spesifikasi teknis.	100	Persen	60.000.000	100	Persen	59.283.000	717.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	60.000.000	3	Unit	59.283.000	717.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan	100	Persen	295.476.240	100	Persen	273.049.937	22.426.303		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	142.053.240	1	Laporan	123.026.937	19.026.303		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	153.423.000	1	Laporan	150.023.000	3.400.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	60.852.670	100	Persen	52.947.670	7.905.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Unit	60.852.670	25	Unit	52.947.670	7.905.000		
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik disemua jenjang	77,78	Persen	103.518.161.086	51	Persen	99.068.035.089	4.450.125.997		
		Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terakreditasi	71,76	Persen		42					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	88,46	Persen	63.588.590.204	75,00	Persen	61.271.592.447	2.316.997.757		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	92,59	Persen		81,67	Persen				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	18	Ruang	2.869.369.253	18	Ruang	2.752.911.382	116.457.871		
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4	Ruang	606.084.571	4	Ruang	604.981.171	1.103.400		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4	Ruang	755.711.877	4	Ruang	724.221.592	31.490.285		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	62	Unit	12.156.166.888	62	Unit	11.943.595.616	212.571.272		
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	Unit	681.365.846	5	Unit	617.374.646	63.991.200		
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4	Paket	283.002.715	4	Paket	266.059.500	16.943.215		
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6	Unit	699.968.681	6	Unit	395.477.800	304.490.881		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	176	Orang	135.924.500	176	Orang	135.924.500	-		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	73	Orang	268.971.000	73	Orang	234.571.000	34.400.000		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	311	Satuan Pendidikan	325.000.000	311	Satuan Pendidikan	312.818.000	12.182.000		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	311	Satuan Pendidikan	31.430.838.265	311	Satuan Pendidikan	31.166.070.740	264.767.525		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	311	Satuan Pendidikan	193.207.200	311	Satuan Pendidikan	172.407.200	20.800.000		
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	11	Ruang	1.736.266.447	11	Ruang	1.569.587.508	166.678.939		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55	Orang	91.867.500	55	Orang	87.067.500	4.800.000		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	Konten Digital	100.000.000	1	Konten Digital	100.000.000	-		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	70	Orang	100.000.000	70	Orang	96.800.000	3.200.000		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	82.402.000	1	Dokumen	72.784.000	9.618.000		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	233.453.200	66.546.800		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Komunitas	228.750.000	1	Komunitas	203.290.000	25.460.000		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	93.600.000	6.400.000		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1522	Buku	101.457.000	1522	Buku	87.605.000	13.852.000		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120	Orang	443.693.500	120	Orang	425.293.500	18.400.000		
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	311	Satuan Pendidikan	131.798.400	311	Satuan Pendidikan	131.798.400	-		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25	Ruang	8.489.646.211	24	Ruang	7.672.302.992	817.343.219	Gagal tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis yaitu 1 paket pengadaan rehabilitasi ruang kelas SD saluwito II	Reviu Bersama Pokja Lakukan reviu penyebab gagal tender dengan Pokja Pemilihan, khususnya mengevaluasi kesesuaian dokumen
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3	Paket	1.277.098.350	3	Paket	1.171.597.200	105.501.150		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama	87,50	Persen	25.130.728.610	102,00	Persen	23.886.862.466	1.243.866.144		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	90,91	Persen		60,42	Persen				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6	Ruang	1.309.878.609	6	Ruang	1.264.599.956	45.278.653		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Paket	54.800.000	1	Paket	52.586.000	2.214.000		
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4	Ruang	436.709.956	4	Ruang	171.112.050	265.597.906		
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6	Unit	704.861.832	6	Unit	703.262.832	1.599.000		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19	Unit	2.600.408.238	19	Unit	2.536.724.042	63.684.196		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang	2.516.834.711	11	Ruang	2.287.352.974	229.481.737		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	Unit	375.220.000	5	Unit	375.220.000	-		
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3	Unit	159.570.000	3	Unit	152.618.400	6.951.600		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	46	Orang	139.045.500	46	Orang	139.045.500	-		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	48	Orang	175.245.000	48	Orang	167.245.000	8.000.000		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	65	Satuan Pendidikan	50.000.000	65	Satuan Pendidikan	50.000.000	-		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	65	Satuan Pendidikan	12.803.747.000	65	Satuan Pendidikan	12.635.713.400	168.033.600		
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			198.739.000			191.539.000	7.200.000		
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	Konten Digital	139.795.000	1	Konten Digital	139.795.000	-		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	62	Orang	178.401.500	62	Orang	176.801.500	1.600.000		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	169.135.750	1	Dokumen	162.653.500	6.482.250		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	131.445.500	1	Dokumen	126.645.300	4.800.200		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Dokumen	62.545.000	1	Dokumen	57.745.000	4.800.000		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	62.475.000	1	Kegiatan	59.275.000	3.200.000		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	65	Satuan Pendidikan	120.243.000	65	Satuan Pendidikan	120.243.000	-		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8	Ruang	2.497.719.914	8	Ruang	2.086.537.012	411.182.902		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	126	Orang	243.908.100	126	Orang	230.148.000	13.760.100		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase sarana dan prasarana pendidikan PAUD	66,67	Persen	9.721.176.772	54,05	Persen	9.043.748.776	677.427.996		
		Persentase PAUD yang terakreditasi	96,51	Persen		18,01	Persen				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12	Unit	2.238.555.600	12	Unit	2.232.988.200	5.567.400		
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	21	Paket	187.500.000	21	Paket	182.418.650	5.081.350		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	173	Orang	75.000.000	173	Orang	75.000.000	-		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	193	Satuan Pendidikan	150.000.000	193	Satuan Pendidikan	150.000.000	-		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	193	Satuan Pendidikan	3.925.028.000	193	Satuan Pendidikan	3.296.730.888	628.297.112		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	193	Satuan Pendidikan	75.000.000	193	Satuan Pendidikan	74.440.000	560.000		
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	70	Orang	150.000.000	70	Orang	150.000.000	-		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	43.042.122	1	Dokumen	43.042.122	-		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	50.000.000	1	Dokumen	50.000.000	-		
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Komunitas	39.000.000	1	Komunitas	39.000.000	-		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	Ruang	434.210.250	2	Ruang	432.869.100	1.341.150		
	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	8	Paket	164.500.000	8	Paket	148.926.796	15.573.204		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150	Peserta didik	75.000.000	150	Peserta didik	75.000.000	-		
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	100.000.000	-		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	65	Orang	145.000.000	65	Orang	145.000.000	-		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	25	Paket	1.101.383.800	25	Paket	1.090.018.320	11.365.480		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang	767.957.000			758.314.700	9.642.300		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase sarana dan prasarana pendidikan NonFormal	66,67	Persen	5.077.665.500	33	Persen	4.865.831.400	211.834.100		
		Persentase Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	94,74	Persen		84,21	Persen				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21	Satuan Pendidikan	38.419.000	21	Satuan Pendidikan	38.419.000	-		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	21	Satuan Pendidikan	4.486.528.000	21	Satuan Pendidikan	4.275.367.000	211.161.000		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen	137.000.000	1	Dokumen	137.000.000	-		
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	143.008.000	1	Dokumen	143.008.000	-		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	87	Paket	99.133.000	87	Paket	98.659.900	473.100		
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80	Orang	143.032.500	80	Orang	143.032.500	-		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar	1	Kegiatan	30.545.000	1	Kegiatan	30.345.000	200.000		
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	100	Persen	63.368.500	100	Persen	63.368.500	-		
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah dasar yang telah menetapkan kurikulum muatan lokal	100	Persen	63.368.500	100	Persen	63.368.500	-		
	Penyusunan model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1	Dokumen	63.368.500	1	Dokumen	63.368.500	-		
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang memenuhi syarat penerbitan izin disatuan pendidikan	93,80	Persen	66.553.400	41,94	Persen	65.341.000	1.212.400		
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal swasta yang memiliki izin operasional aktif	33,33	Persen	66.553.400	26,67	Persen	65.341.000	1.212.400		
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	Dokumen	66.553.400	1	Dokumen	65.341.000	1.212.400		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	83,33	Persen	3.445.860.400	33,33	Persen	3.360.312.900	85.547.500		
		Persentase Organisasi Pemuda Yang Terfasilitasi dalam kewirausahaan	75,00			41,67	Persen				
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	50	Persen	3.445.860.400	41,67	Persen	3.360.312.900	85.547.500		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50	Orang	47.939.000	50	Orang	47.939.000	-		

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET			REALISASI			Sisa Anggaran	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Kinerja			Kinerja		Anggaran			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1	Kegiatan	176.078.100	1	Kegiatan	173.618.100	2.460.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	130	Orang	303.524.000	130	Orang	287.564.000	15.960.000		
	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2	Unit	2.918.319.300	2	Unit	2.851.191.800	67.127.500		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase penyelenggaraan kompetisi olahraga dijenjang pendidikan Daerah Kabupaten/Kota	66,67	Persen	7.006.984.655	71,43	Persen	6.512.747.705	494.236.950		
			83,33	Persen		70,00	Persen				
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Cabang Olahraga yang Dipertandingkan dalam Kejuaraan Daerah	83,33	Persen	911.076.200	70	Persen	909.576.200	1.500.000		
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	570	Orang	911.076.200	570	Orang	909.576.200	1.500.000		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase atlet binaan ke tingkat provinsi	100	Persen	410.000.000	100	Persen	410.000.000	-		
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	Laporan	410.000.000	1	Laporan	410.000.000	-		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang dibangun atau direhabilitasi	66,67	Persen	5.685.908.455	46,67	Persen	5.193.171.505	492.736.950		
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	9	Unit	5.685.908.455	8	Unit	5.193.171.505	492.736.950	Gagal tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis yaitu 1 paket Rehabilitasi Gelanggang Olahraga Manakarra	Reviu Bersama Pokja Lakukan reviu penyebab gagal tender dengan Pokja Pemilihan, khususnya mengevaluasi kesesuaian dokumen
	JUMLAH				423.653.993.971			415.476.067.288	8.177.926.683	98,07	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah di bidang pendidikan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, efektif dan efisien maka diperlukan pengelolaan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata capaian antara target sasaran dan realisasi yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tercapai.

B. Saran-saran

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju di masa mendatang antara lain :

- (1) Menetapkan Indikator kinerja pada awal penyusunan berbagai dokumen untuk memudahkan menyusun capaian kinerja;
- (2) Perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan kegiatan dilakukan lebih selektif dan lebih terukur sehingga target-target yang sebelumnya telah ditentukan dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya;
- (3) Evaluasi kinerja perlu ditingkatkan guna mengetahui hasil kinerja di masing-masing bidang pengampu indikator kinerja utama OPD;
- (4) Memaksimalkan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak demi meningkatnya kualitas pelayanan di bidang pendidikan.